

**PENINGKATAN PETUGAS SAMPAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Tesis Diajukan Kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**Tengku Dahlan
L4D003109**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal Agustus 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Agustus 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. Mardwi Rahdriawan, MT

Pembimbing Utama



Ir. Nany Yuliasuti, MSP

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



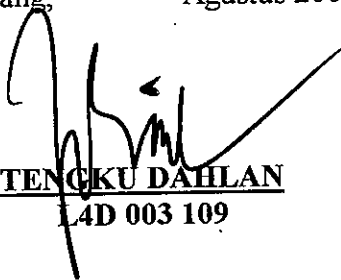
Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang,

Agustus 2005



TENCKU DAHLAN
L4D 003 109

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4219 / T / MPWK / C1
Tgl.	10 / 5 06

“Orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya. Sedangkan orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya.” (Al-Hadits)

Dengan ilmu akan membuat hati menjadi lapang, meluaskan cara pandang, membukakan cakrawala sehingga jiwa dapat keluar dari berbagai keresahan, kegundahan dan kesedihan

*Ilmu bagaikan mata pedang yang sangat tajam
Akan membawa kemaslahatan umat,
Jika dimanfaatkan pada jalan yang benar
Dan akan membawa bencana
Jika disalah gunakan*

*Tesis ini dengan bangga kupersembahkan kepada:
Isteriku Nurfahmi
Anak-Anakku: T. Aurelia Fadliany,
T. Fardhon Assyukri, T. Natasya Auzia Fahyu
Atas dorongan, pengertian dan kesabaran serta pengorbanannya Dalam
Penyelesaian studi ini*

ABSTRAK

Pembangunan adalah satu upaya penting dalam pengelolaan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berhasil yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas lingkungan. Pembangunan bisa mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan berupa tercapainya tujuan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan dampak negatifnya antara lain limbah (sampah) hasil pembangunan ada yang tidak dapat ditangani dengan baik. Kecenderungan perubahan sosial juga merupakan dampak dari suatu pembangunan yang menghasilkan proses konsentrasi penduduk kota.

Salah satu kebutuhan pelayanan penduduk adalah pelayanan persampahan. Pertambahan penduduk yang cepat diikuti dengan kemajuan teknologi membawa dampak terhadap peningkatan sampah yang dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas akibat dari aktivitas manusia di kota tersebut. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk semakin beragam tidak hanya berupa bahan organik tetapi juga dari bahan-bahan anorganik. Usaha mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya timbunan sampah, mengetahui karakteristik pengumpul, persepsi stakeholder dalam pengelolaan sampah serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan sampah petugas kebersihan merupakan dasar untuk menyusun program pengelolaan persampahan lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan data eksisting serta menggunakan media kuisener sebagai alat untuk mengetahui tingkat persepsi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kota Tanjungpinang sudah cukup memahami dengan benar segala sesuatu yang berkaitan dengan sampah. Namun demikian ternyata kesadaran penduduk tentang pentingnya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat masih sangat kurang sehingga masih banyak terlihat penimbunan sampah liar yang terdapat di sekitar pekarangan tempat tinggal penduduk. Akibatnya, pemerintah berinisiatif mengadakan program jumat bersih dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sehingga dapat meringankan tugas para petugas pengumpul sampah yang harus melayani pengumpulan sampah di seluruh kota.

Faktor yang mempengaruhi para petugas kebersihan dalam kegiatan pengumpulan sampah adalah faktor kesadaran dari masing-masing individu dari para petugas kebersihan terhadap tugas yang diembannya, faktor waktu kerja, pengawasan yang dilakukan oleh instansi Dinas Kebersihan dalam mengkoordinir pengumpulan sampah, serta faktor gaji/upah yang diberikan.

Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga di kota Tanjungpinang berupa banyaknya penduduk yang berusaha untuk memusnahkan sampah yang menumpuk atau berserakan dengan membakarnya.

Kata Kunci: sampah, peningkatan pelayanan

ABSTRACT

Development is one of the important effort in management with vision of environment. A success development is a development which have a vision of environment marked by the progressively increase of environmental quality. Development can have positive impact and also the negativity. The positive impact of development in the form of reaching of development aim, so that it can improve the quality of human life, while its negative impact could form in many ways, such as waste that came as a result of development which cannot be handled correctly by human. Tendency of social change/ social reform also represent the impact from a development yielding process of population concentration.

One of the requirement of white colars resident is the service solid waste. The rapidly increasing of white colars resident which quickly followed by the progress of technology bring impact to the increase of garbage production in form of quality and quantity. the solid waste that came out from resident activity is getting more and more variative. The solid waste not only consist of organic substances also contains anorganic substance. The progressively increase of resident growth, either due birth and or the migration, society behavior which progressively major personal ego, mount education which relative lower and the change of standart living society in modern culture causing the increase of amount and variety of salid waste urban region.

This research is using descriptive quantitative analyses which using quisioner media to take the information as a tool to know the perception and participation of society in solid waste management in Tanjungpinang City.

Based on the result of the research, we know that almost people in Tanjungpinang city knows about anything deals with solid waste. But apparently the resident still lack of the consciousness about the important thing of the clean and healthier environment Then, the government initiate to organize a Clean Friday programme in order to improve people's consciousness about the important thing of the clean and healthier environment and to help the cleaner officer to collect all the solid waste in the city.

The important factor that influence the cleaner officer to collect the solid waste such as the consciousness from each of the cleaner officer, the time of work, the supervision from Cleanliness Department to coordinate solid waste collecting and the salary factor which gives to the cleaner officer.

Society participation in order to improve the garbage household management in Tanjungpinang City such as a lot of residence that burn the pile of garbage or the greedy of garbage.

Key words : garbage, improvement of service

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan baik.

Penelitian Tesis ini diberi judul : **“Peningkatan Petugas Sampah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang”**.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Selesaiannya penyusunan Tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk data yang berupa buku kepustakaan maupun petunjuk di dalam penulisan. Maka dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.
2. Ibu Ir. Nany Yuliasuti, MSP, Selaku Mentor.
3. Bapak Ir. Mardwi Rahdriawan MT, selaku Co-Mentor.
4. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL, selaku pembahas.
5. Bapak Ir.Irawan Wisnu, MT selaku penguji.
6. Istri dan anak-anakku tersayang, yang selalu setia dalam memberi dukungan bagi penyelesaian Tesis ini.
7. Ibu Walikota Tanjungpinang, Wakil Wali Kota Tanjungpinang dan Sekretaris Kota Tanjungpinang

Yang telah memberi perhatian penuh terhadap penyelesaian penyusunan Tesis ini.

Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa Tesis yang dikerjakan sebatas kemampuan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan Tesis ini

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi penulis sendiri serta dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menangani masalah sampah.

Semarang, Agustus 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Ruang Lingkup	11
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	24
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DAN MASALAH PENGELOLAAN SAMPAH KOTA	26
2.1 Ciri-ciri Struktur Sosial Masyarakat Perkotaan	26
2.1.1 Tiga Aspek Pembangunan Masyarakat	30
2.1.2 Tiga Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	36
2.1.3 Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan	39
2.2 Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah	40
2.3 Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	43
2.3.1 Pengertian dan Jenis Sampah	43
2.3.2 Sumber Sampah	44
2.4 Pengumpulan Sampah	46
2.5 Sistem Pengelolaan Sampah	55
2.6 Beberapa Aspek Yang Berhubungan Dengan Sistem Pengelolaan Sampah	57
BAB III : KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK TANJUNGPINANG	
3.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	62
3.2 Kebijakan Persampahan Kota Tanjungpinang	70

2.3 Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	43
2.3.1 Pengertian dan Jenis Sampah.....	43
2.3.2 Sumber Sampah	44
2.4 Pengumpulan Sampah.....	46
2.5 Sistem Pengelolaan Sampah.....	55
2.6 Beberapa Aspek Yang Berhubungan Dengan Sistem Pengelolaan Sampah	56
2.6.1 Struktur Organisasi.....	57
2.6.2 Pembiayaan	57
2.6.3 Pelaksanaan.....	57
2.6.4 Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan	58
2.6.5 Pelaporan.....	58
2.6.6 Cara Kontrak.....	59
2.6.7 Peraturan dan Landasan Kerja	59
2.6.8 Hubungan dengan Masyarakat.....	60
2.6.9 Perencanaan	61

BAB III : KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK

TANJUNGPINANG	62
3.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	62
3.1.1 Kondisi Fisik	62
3.1.2 Keadaan Iklim	64
3.1.3 Demografi	65
3.2 Kebijakan Persampahan Kota Tanjungpinang.....	70
3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	71
3.4 Pengangkutan Sampah	74
3.5 Tempat Pembuangan Akhir	74
3.6 Sistem Pengelolaan Sampah.....	76
3.7 Dinas Kebersihan Kota Tanjungpinang	76
3.7.1 Struktur Organisasi.....	79
3.7.2 Visi dan Misi.....	82
3.7.2.1 <u>Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan</u> <u>Kota Tanjungpinang</u>	82
3.7.2.2 <u>Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan</u> <u>Kota Tanjungpinang</u>	82

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI TANJUNGPINANG

4.1 Analisis Terhadap Timbulnya Penimbunan Sampah di kota Tanjungpinang	85
4.1.1 Pertumbuhan dan Pola Perkembangan Kota Tanjungpinang.....	85
4.1.2 Timbulnya Penimbunan Sampah di Kota Tanjungpinang.....	89
4.2 Kondisi Empiris Peningkatan Sumberdaya Manusia Dalam	

Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang.....	95
4.2.1 Sumber Kerusakan Lingkungan.....	96
4.2.2 Upaya Masyarakat Dalam Memelihara Kebersihan Kota Tanjungpinang.....	98
4.3 Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karakteristik Petugas Kebersihan Kota Tanjungpinang	101
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kebutuhan Data Penelitian.....	21
Tabel 3.1. Penggunaan Lahan Kota Tanjungpinang.....	63
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Awal Tahun 2004	65
Tabel 3.3. Jumlah Volume Sampah Yang Terangkut.....	68
Tabel 3.4. Fasilitas Dan Sarana Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang	72
Tabel 3.5. Data Kepegawaian Dinas Kebersihan Dan Pertaman Kota Tanjungpinang.....	78
Tabel 3.6. Distribusi Petugas Operasional Pengelola Sampah Di Kota Tanjungpinang.....	78
Tabel 3.7. Distribusi Tingkat Pendidikan Petugas Pengelola Sampah Di Kota Tanjungpinang.....	79
Tabel 4.1. Lokasi Penempatan Tps Kontainer Di Kota Tanjungpinang	89
Tabel 4.2. Sumber Timbunan Sampah Dan Jumlah Produksi Sampah Di Wilayah Kota Tanjungpinang	91
Tabel 4.3. Karakteristik Pengumpul Sampah	91
Tabel 4.4. Karakteristik Dan Tingkat Pendidikan Pemuka Masyarakat Kota Tanjungpinang	92
Tabel 4.5. Persepsi Pemuka Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengumpul Sampah.....	93
Tabel 4.6. Persepsi Dan Pandangan Masyarakat Tentang Sampah Di Kota Tanjungpinang	94
Tabel 4.7. Perilaku Petugas Kebersihan Dalam Melakukan Kegiatan Pengumpulan Sampah Berdasarkan Faktor Penyebab Belum Meningkatnya Kegiatan Pengupulan Sampah.....	102
Tabel 4.8. Klasifikasi Jumlah Pendapatan Upah/Gaji Petugas Kebersihan Kota Tanjungpinang	103
Tabel 4.9. Pendapat Pegawai Instansi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	

Mengenai Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang	105
Tabel 4.10. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Mengenai Peningkatan Pengumpulan Sampah Di Kota Tanjungpinang	106

DAFTAR GAMBAR

1.1. Bagan Kerangka Pemikiran	15
2.1. Sistem Pengelolaan Sampah	55
2.2. Hubungan Elemen Sistem Pengelolaan Sampah	56
3.1. Pengangkutan Sampah Oleh Petugas Kebersihan Tanjungpinang.....	67
3.2. Kegiatan Pengumpulan Sampah di Kota Tanjungpinang.....	67
3.3. Penumpukan Sampah di Lokasi Tepi Laut	69
3.4. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.....	69
3.5. Kondisi Truk Pengangkutan Sampah di Wilayah Kota Tanjungpinang .	73
3.6. Kondisi TPS Kontainer di Tanjungpinang	73
3.7. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan	80
3.8. Peta Wilayah kota Tanjungpinang	84
4.1. Peta Lokasi Penelitian di Kota Tanjungpinang.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah satu upaya penting dalam pengelolaan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berhasil yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas lingkungan (Soeryani, M. 1987). Pembangunan bisa mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan berupa tercapainya tujuan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan dampak negatifnya antara lain limbah (sampah) hasil pembangunan ada yang tidak dapat ditangani dengan baik. Kecenderungan perubahan sosial juga merupakan dampak dari suatu pembangunan yang menghasilkan proses konsentrasi penduduk kota. (Soeryani, M. 1997).

Mengenai permasalahan tersebut dapat dilihat pada perkembangan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyaksikan perubahan yang berarti dalam pembangunan pelayanan, hampir semua infrastruktur fisik, sosial, dan kesehatan yang disediakan oleh daerah bersangkutan belum dapat mengimbangi populasi kota yang terus bertambah.

Perkembangan perkotaan membawa konsekuensi terhadap penyediaan infrastruktur perkotaan untuk melayani penduduknya. Penyediaan infrastruktur perkotaan harus sejalan atau selaras dengan perkembangan perkotaan.

Penyediaan infrastruktur yang tidak seimbang dengan perkembangan kota akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan.

Salah satu kebutuhan pelayanan penduduk perkantoran adalah pelayanan persampahan. Pertambahan penduduk perkantoran yang cepat diikuti dengan kemajuan teknologi membawa dampak terhadap peningkatan sampah yang dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas akibat dari aktivitas manusia di kota tersebut. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk semakin beragam tidak hanya berupa bahan organik tetapi juga dari bahan-bahan anorganik. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, baik karena kelahiran ataupun migrasi, perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan ego pribadinya, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan adanya perubahan standar hidup masyarakat yang mengutamakan produk hasil kebudayaan modern untuk konsumsinya, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah dan keragaman sampah di perkotaan. Beragamnya jenis sampah di perkotaan merupakan ciri dari kebudayaan yang semakin maju dan modern (Sa'id, 1987).

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sampah di perkotaan akan mengakibatkan permasalahan yang cukup kompleks bila tidak ditangani atau dikelola dengan baik sejak dini, terutama dari segi lingkungan dan kebersihan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Penanganan masalah persampahan di perkotaan saat ini masih banyak mengalami kendala baik dalam masalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia maupun manajemen pengelolaannya. Kendala dalam penanganan masalah persampahan di perkotaan terlihat dengan adanya timbunan sampah yang tidak pada

tempatnyanya dan tingkat pelayanan yang belum menjangkau semua masyarakat. Masih banyaknya timbunan sampah yang tidak pada tempatnya atau dibuang sembarangan merupakan salah satu indikasi masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Keadaan masyarakat yang masih sembarangan, tidak peduli dan menyerahkan penyelesaiannya pada pemerintah. (Sa'id, 1987). Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bila sampah yang dihasilkan sudah dibuang dari halamannya atau lingkungan sekitarnya masalah persampahan sudah selesai, tidak berfikir bahwa sampah tersebut akan menimbulkan masalah ditempat lain. Perilaku masyarakat yang tidak peduli dan sembarangan dalam penanganan sampah dapat disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan. Perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan adalah sifat individual yang semakin besar, solidaritas yang menurun dan kepedulian terhadap lingkungan yang semakin kecil (Daldjoeni 1997).

Melihat pertumbuhan ekonomi kota dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 beberapa sektor ekonomi kota seperti industri, perdagangan, dan jasa mulai memberikan sumbangan yang berarti terhadap PDRB Kota berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kota. Hal tersebut terbukti dengan mulai positifnya laju pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang sebesar 4,05%. (Kimpraswil Propinsi Riau).

Secara umum dalam perkembangannya perkotaan membawa konsekuensi terhadap penyediaan infrastruktur perkotaan harus sejalan atau selaras dengan perkembangan perkotaan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara

kebutuhan dengan penyediaan. Kesenjangan penyediaan infrastruktur dengan kebutuhan akan membawa dampak terhadap penurunan tingkat pelayanan terhadap penduduk di perkotaan.

Salah satu kebutuhan pelayanan penduduk perkotaan adalah pelayanan persampahan yang dalam penanganannya pada saat ini masih banyak mengalami kendala, baik masalah sarana dan prasarannya, sumberdaya manusia maupun manajemen pengelolaannya. Sampah yang dihasilkan dari aktifitas penduduk semakin beragam, tidak hanya berupa bahan organik tetapi juga dari bahan – bahan organik. Masih banyaknya timbunan sampah yang tidak pada tempatnya atau dibuang sembarangan merupakan salah satu indikasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Beragam jenis sampah di perkotaan merupakan ciri kebudayaan yang semakin maju moderen.

Penanganan masalah persampahan perkotaan saat ini masih banyak mengalami kendala, baik masalah sarana maupun prasarannya, sumber daya manusia perkotaan terlihat dengan adanya timbunan sampah yang tidak pada tempatnya dan tingkat pelayanan belum ada menjangkau semua masyarakat. Kondisi umum adanya kecenderungan pertumbuhan pada pusat-pusat permukiman yang mengarah ke pinggiran pusat kota, hal ini sangat logis mengingat pusat kota kekurangan lahan yang diperlukan.

Beberapa pola pikir yang berkembang bahwa bila sampah yang dihasilkan sudah dibuang dari halamannya atau lingkungan sekitarnya masalah sampah sudah selesai, terlupakan bahwa sampah tersebut akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Perilaku masyarakat yang tidak peduli dan

sembarangan dalam penanganan sampah bisa memberi pengaruh negatif terhadap pengolahan sampah yang kurang baik, menurut Kusnopranto dalam buku Kesehatan Lingkungan, 2000, adalah :

1. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
2. Pengaruh terhadap lingkungan.
3. Pengaruh terhadap social masyarakat, dan
4. Pengaruh terhadap perekonomian daerah / nasional.

Penanganan sampah merupakan kegiatan terpadu yang mencakup lima elemen pokok, yaitu penghasil sampah, pengumpulan, transportasi, proses pengolahan dan pembuangan akhir. Semua elemen pengelolaan sampah tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip. Kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, estetika dan sikap masyarakat (Murdiriyanto, 1996). Penanganan masalah persampahan harus dilakukan secara sederhana dan sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mencakup 5 (lima) elemen pokok mulai dari penghasil sampah sampai dengan pembuangan akhir. Penghasil sampah merupakan elemen pokok yang perlu penanganan pertama dan mendasar. Penghasil sampah adalah setiap orang / badan yang menghasilkan sampah, dapat bersal dari rumah tangga (domestik), industri, komersial (pasar dan toko) ataupun instansi (kantor, sekolah). Rumah tangga atau domestik merupakan pernghasil sampah paling besar dan jenisnya beragam (Said, 1986). Sampah rumah tangga atau domestik terutama yang berasal dari lingkungan perumahan atau permukiman.

Sistem pengelolaan sampah perkotaan selalu diliputi oleh komponen-komponen subsistem yang paling mendukung antara satu dengan yang lain, saling berhubungan untuk mencapai tujuan, yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur. Komponen-komponen tersebut adalah subsistem organisasi dan manajemen (subsistem institusi), subsistem teknik operasional (subsistem teknik), subsistem pembiayaan (subsistem finansial), subsistem hukum dan peraturan (subsistem hukum) dan subsistem peran serta masyarakat (Syafrudin, 1999).

Syafrudin lebih lanjut mengemukakan bahwa tanpa ada partisipasi masyarakat, maka semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program untuk berbuat dan bertindak laku sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama yang tercermin dalam program. Hal yang perlu diperhatikan untuk membiasakan masyarakat bertindak laku sesuai program antara lain, bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata. Menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat, serta mengetahui kebiasaan dalam pengelolaan persampahan selama ini.

Salah satu faktor yang perlu diketahui guna penanganan persampahan khususnya tumpukan dan timbunan sampah rumah adalah peningkatan petugas kebersihan dalam pengumpulan sampah dan perilaku petugas pengumpulan sampah atau dalam kegiatan pengumpulan, pembuangan sampah. Selain itu, perlu diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan petugas sampah tersebut. Dengan diketahuinya perilaku atau kebiasaan masyarakat dan

perilaku pengumpulan sampah dalam pengumpulan sampah di lingkungan permukiman perkotaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan atau acuan untuk perbaikan sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kondisi di lingkungan tersebut. Setiap orang diharapkan berperilaku sama dengan orang lain pada umumnya, maka seyogyanya peraturan atau ketentuan tidak boleh bertentangan dengan karakteristik masyarakat yang diatur (Sugianto, 1994).

Dengan memperhatikan beberapa fenomena yang dijelaskan diatas, maka menarik kiranya untuk dilakukan penelitian tentang peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan rumah tangga di kota Tanjungpinang.

1.2. Perumusan Masalah

Pertambahan penduduk perkotaan yang cepat diikuti dengan kemajuan teknologi membawa dampak terhadap peningkatan sampah yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas akibat dari aktivitas manusia di kota tersebut. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana serta prasarana persampahan mengakibatkan permasalahan persampahan menjadi cukup rumit dan kompleks. Permasalahan sampah menyangkut banyak elemen, memerlukan teknologi dan membutuhkan dana yang cukup besar serta memerlukan kemauan yang kuat untuk melaksanakannya.

Dalam penanganan sampah, pemerintah kota mengalami banyak faktor yang perlu mendapat perhatian, hal ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat minim serta kelembagaan yang belum mampu

operasional. Kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini masih berpedoman pada tata cara yang selama ini dilakukan misalnya; para petugas menyapu jalan, pewadahan sampah sementara pengumpulan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), kemudahan pengangkutan serta pembuangan akhir, dan hampir setiap kota untuk TPA. Tata cara kerja memiliki kesamaan yaitu sebahagian besar masih memakai metode *open dumping*. Padahal metode ini sudah tidak mendapat dukungan, karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu estetika. *Cost* untuk metode lain terlalu tinggi sehingga wilayah dengan penduduk padat dan tingkat ekonomi rendah sering tidak tersentuh pelayanan persampahan. Masih adanya kebiasaan masyarakat perkotaan yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Permasalahan diatas menyebabkan banyak terjadinya tumpukan dan penimbunan sampah.

Guna penanganan tumpukan dan penimbunan sampah tersebut perlu diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya timbunan sampah. Penyebab terjadinya timbunan sampah bisa dilihat dari dua hal, yaitu dari masyarakat dan dari pemerintah. Penyebab dari pemerintah selalu bersifat klasik, yaitu keterbatasan dana, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengetahui penyebab dari sisi masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu cara atau kebiasaan masyarakat (termasuk para petugas sampah) saat ini dalam pengumpulan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi cara atau kebiasaan masyarakat (termasuk pengumpul sampah).

Untuk menangani masalah persampahan secara menyeluruh, maka diperlukan adanya suatu landasan yang kuat terutama menyangkut masyarakat

sebagai penghasil sampah dan semua pihak yang terlibat dalam masalah persampahan termasuk Pemerintah Kota Tanjungpinang. Mengetahui kondisi dan kebiasaan masyarakat dan para pengumpul sampah (penarik gerobk sampah) saat ini dalam pengumpulan sampah, menyamakan persepsi tentang sampah merupakan salah satu dasar untuk menyusun program pengelolaan persampahan lebih lanjut.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana petugas kebersihan dalam melakukan kegiatan pengumpulan sampah, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja para petugas kebersihan dalam pengumpulan sampah.

Sebagai jawaban awal terhadap pertanyaan tersebut antara lain adalah, perlunya untuk memahami tentang peningkatan sistem kerja dari para petugas kebersihan dalam pengumpulan sampah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dengan diketahuinya cara masyarakat dan para petugas kebersihan dalam pengumpulan sampah, maka dapat diketahui pula penyebab terjadinya tumpukan dan timbunan sampah liar.

Dengan diketahuinya faktor penyebab terjadinya tumpukan dan timbunan sampah liar tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengatasi masalah timbunan sampah liar yang banyak terdapat di Kota Tanjungpinang.

Melihat kondisi diatas, maka rumusan masalah; pengelolaan sampah rumah tangga / domestik di Kota Tanjungpinang oleh sumber daya manusia yang terlibat belum ada peningkatan, sehingga mengakibatkan;

- Permukiman masih kotor, dan tumpukan sampah masih terlihat dilingkungan permukiman kota.
- Masih belum terangkatnya sampah domestik yang ada di permukiman ke TPS maupun TPA.

Adapun pokok permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap masalah persampahan di Kota Tanjungpinang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para petugas kebersihan dalam kegiatan pengumpulan sampah ?
3. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga di kota Tanjungpinang ?

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengkaji peningkatan petugas sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kota Tanjungpinang

1.3.2. Sasaran Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya timbunan sampah di Kota Tanjungpinang.
2. Mengetahui karakteristik pengumpul sampah di kota Tanjungpinang
3. Mengetahui sejauh mana persepsi stakeholder dalam pengelolaan sampah

4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengolahan sampah oleh petugas kebersihan kota Tanjungpinang

1.3.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diketuainya faktor-faktor yang menjadi penyebab penimbunan sampah di Kota Tanjungpinang.
2. Diketuainya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku para petugas pengumpul sampah dalam pengumpulan sampah rumah tangga.
3. Berguna sebagai bahan atau acuan untuk mengatasi masalah timbunan sampah liar yang saat ini timbul di perkotaan.
4. Sebagai acuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.

1.4. Lingkup Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup penelitian secara keruangan di wilayah perkotaan, yaitu suatu daerah yang secara fisik sudah menunjukkan ciri-ciri suatu daerah perkotaan. Wilayah perkotaan yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan suatu wilayah perkotaan di Propinsi Kepulauan Riau yang berkembang cukup pesat. Luas wilayah Kota Tanjungpinang adalah 239,5 Km² (sesuai UU No. 5 Tahun 2001 tentang Kota Otonomi), secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan

Tanjungpinang Kota, Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Dari empat Kecamatan tersebut, wilayah yang merupakan kawasan tumbuh cepat dan padat terdapat di lima Kelurahan. Permasalahan sampah terlihat dengan banyak tumpukan dan timbunan sampah liar yang ada di kota Tanjungpinang terutama pada lima kelurahan yang diantaranya adalah; Kelurahan Tanjungpinang Kota dan Kelurahan Kemboja di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat dan Kelurahan Sungai Jang yang berada di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, sudah tentu berhadapan dengan permasalahan yang cukup kompleks, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Masalah persampahan merupakan salah satu kasus lingkungan yang dihadapi oleh Kota Tanjungpinang.

Secara substansial, lingkup penelitian ini ditekankan pada persepsi masyarakat perkotaan mengenai sampah dan perilaku atau kebiasaan masyarakat perkotaan dalam pengumpulan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat tersebut. Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas maka Kota Tanjungpinang dipilih sebagai lokasi penelitian. Mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar peta wilayah Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Petugas kebersihan sampah merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah secara keseluruhan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam kegiatan pengumpulan sampah. Kegiatan para petugas kebersihan merupakan kegiatan yang paling sulit pelaksanaannya, karena berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penghasil sampah, seperti: sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, kegiatan usaha/perdagangan, perkantoran, sekolah, dan lain-lain.

Pokok materi yang akan dibahas dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

- Persepsi masyarakat tentang sampah dan perilaku masyarakat dalam pengumpulan sampah
- Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat

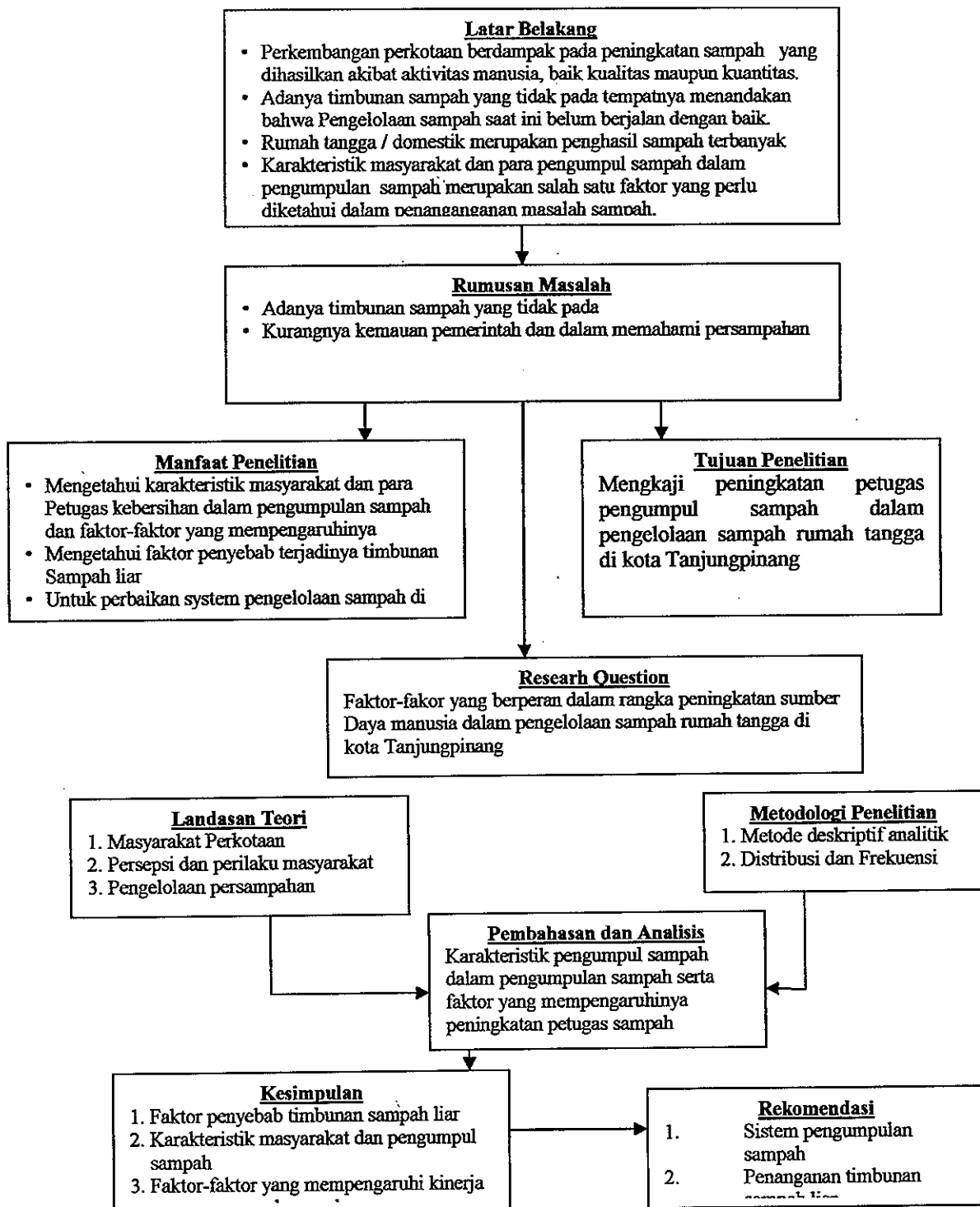
1.5 Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau pengaturan terhadap timbunan sampah, mulai dari penyimpanan setempat sampai pada pembuangan akhir sampah. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ditimbulkan yaitu adanya sampah terutama terhadap timbunan sampah liar.

Tumpukan dan timbunan sampah liar disebabkan oleh dua sisi yaitu; masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pemerintah yang mengadakan pelayanan. Keterbatasan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana

pemerintah daerah menyebabkan pelayanan tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga ada masyarakat yang membuang sampahnya secara sembarangan atau pada tempat timbunan liar.

Atas dasar masalah dan penyebab tersebut, maka *research question* yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berperan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kota Tanjungpinang.



GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN

1.6 Metode Penelitian

Penelitian mengenai peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Natsir, 1988). Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengetahui gambaran mengenai persepsi dan perilaku masyarakat perkotaan pada saat ini dalam pengumpulan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Perilaku yang akan diteliti dikhususkan pada perilaku yang dapat dibentuk, perilaku yang diperoleh, perilaku yang dipelajari melalui proses belajar. Perilaku psikologis inilah yang mendominasi sebagian besar perilaku manusia.

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian

Kajian ini akan menggunakan pendekatan studi kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan pada studi kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian yang akan dicapai. Pendekatan kualitatif dilakukan juga karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik sehingga diperlukan suatu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya untuk menjangkau informasi secara mendalam dari berbagai fenomena atau permasalahan yang ada di dalam suatu obyek yang diteliti,

dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan metode pendekatan kuantitatif yang dilakukan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh dari lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor, 1973 dalam monolog, 2002:3, metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para responden maupun dari hasil pengamatan di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana yang dilihat (Sugiyono, 2000). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan seorang peneliti mendapatkan data primer dari sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang bersifat analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri.

Miles (1992: 1) mengatakan bahwa data kualitatif merupakan suatu sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral. Penemuan-penemuan dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai mutu yang tidak dapat disangkal. Kalimatnya bersifat khusus bilamana disusun kedalam bentuk cerita atau peristiwa mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup dan penuh makna, sehingga dapat jauh lebih meyakinkan para pembacanya dari pada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka (Miles, 1992: 2).

Selain itu pendekatan yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah metode pendekatan survey, yaitu suatu penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Van Dalen dalam Arikunto (2002: 93) mengatakan bahwa pendekatan survey ini merupakan bagian dari metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.

Menurut Whitney dalam Nazir (1988: 63), berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berbagai pengaruh dari suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga terbentuk sebuah studi yang komparatif.

Terdapat dua jenis penelitian dalam evaluasi, yaitu evaluasi formatif adalah menekankan pada proses dan evaluasi sumatif yang menekankan pada produk (Kiddper, 1981). Evaluasi formatif bertujuan untuk mendapatkan *feedback* (umpan balik) dari suatu aktifitas dalam proses, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan keefektifan program atau produk. Evaluasi sumatif menekankan pada keefektifan pencapaian program berupa produk tertentu .

1.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian akan dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- Menyusun proposal penelitian,
- Melakukan kajian pustaka, untuk mendapatkan landasan teori serta menentukan variabel-variabel yang akan dikaji atau diteliti.
- Menyiapkan kelengkapan administrasi (ijin penelitian, permohonan data, dll).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- Mencari data primer, data sekunder dan data penunjang.
- Mengolah dan menganalisa data.
- Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

3. Tahap Penyelesaian / Pelaporan

Pada tahap penyelesaian / pelaporan, kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Menyusun konsep (*draft*) laporan hasil penelitian,
- Menyusun laporan akhir hasil penelitian
- Menyusun ringkasan (*summary*) hasil penelitian

4. Variabel Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, serta memperhatikan kajian teori terutama pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku

masyarakat serta perilaku pengumpul sampah dalam pengumpulan sampah, maka variabel penelitian meliputi :

1. Variabel terpengaruh (*Dependent Variabel*)

Variabel terpengaruh meliputi :

- Peningkatan pengumpulan sampah oleh petugas baik secara komunal maupun individu

2. Variabel Pengaruh (*Independent Variabel*)

Variabel Pengaruh meliputi :

- Tingkat pendidikan
- Tingkat pendapatan para pengumpul sampah
- Peraturan mengenai sampah yang ada di masyarakat
- Sarana dan prasarana persampahan yang ada
- Persepsi terhadap sampah
- Jarak dengan TPS
- Sarana jalan yang ada
- Kebijakan pemerintah setempat

1.6.3 Kebutuhan Data

Data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena berfungsi sebagai bahan untuk analisis. Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang merupakan alat Bantu dalam pengambilan keputusan.

Sesuai dengan variabel penelitian yang telah ditentukan, maka kebutuhan data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk dimanfaatkan dalam penelitian ini.

TABEL 1.1
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

DATA	VARIABEL	SUMBER	MANFAAT
Lokasi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Wilayah - Kondisi fisik - Area terbangun - Kepadatan bangunan - Sarana & prasarana persampahan 	Kelurahan / Kecamatan Cipta Karya Bappeko Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Mengetahui gambaran fisik lokasi
Kondisi Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan pengumpul sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendidikan - Pendapatan - Peraturan yang ada di masyarakat - Sarana & prasarana persampahan yang ada - Jumlah penduduk - Kepadatan penduduk - Mata pencaharian 	Desa / Kecamatan Kuesioner Wawancara, Tokoh Masyarakat Dinas Kebersihan	Mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan pengumpul sampah
Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - persepsi tentang sampah - pola pengumpulan sampah - jarak pelayanan dengan TPS - peraturan tentang sampah di masyarakat - sarana & prasarana persampahan - kemauan Pemerintah Kota 	Kuesioner : Tokoh Masyarakat, Petugas Kebersihan, Pegawai Dinas Kebersihan	Mengetahui sistem pengelolaan sampah di masyarakat
Kebijakan Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan sampah - Kemauan 	Kuesioner: Dinas Kebersihan	Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota

DATA	VARIABEL	SUMBER	MANFAAT
	Pemerintah Kota - Kebijakan persampahan - Sistem pengelolaan sampah kota		

Sumber : Hasil Analisis 2004

1.6.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data, baik data primer, data sekunder dan data penunjang lainnya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi, yaitu data sekunder dan data penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian tidak jarang sudah tersedia di berbagai kepustakaan (artikel, makalah, hasil penelitian, dll) serta dokumen-dokumen resmi pada instansi (Perda, Laporan Kegiatan/Proyek, Data Statistik, dll).
2. Penyebaran kuesioner, dilakukan untuk mendapatkan data primer dari masyarakat secara umum yang ada di wilayah penelitian.
3. Observasi lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi fisik lokasi atau obyek penelitian.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam menentukan teknik pengolahan dan penyajian data, akan sangat tergantung pada teknik yang akan dipergunakan dalam penelitian. Sedangkan teknik yang dipergunakan untuk pengujian tergantung pada interaksi yang

mencakup dua hal yaitu; macam data yang akan dianalisis dan bentuk hipotesisnya (Sugiono, 2000: 16).

Data primer diperoleh melalui survei lapangan dan penyebaran kuesioner, yang hasilnya akan diolah dan disajikan dalam tabulasi berdasarkan pengelompokan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar berdasarkan pengelompokan.

1.6.6 Teknik Sampling

Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan besarnya populasi yang akan di survei, maka untuk mempermudah pelaksanaan penelitian digunakan cara sampling. Metode pengambilan sampling atau teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Cluser Sampling* (Area sampling). Teknik sampling daerah ini melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Daerah yang akan digunakan sampel adalah wilayah Desa / Kelurahan yang ada timbunan sampah liarnya (Lima Kelurahan). Sedangkan penentuan orang-orang yang akan digunakan adalah sampel pada masing-masing kelurahan dengan Proporsional Stratified Random Sampling. Metode teknik sampling ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata (Sugiono, 2000: 57-59).

1.6.7 Teknik Analisis Data

Data dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden bisaanya

berbentuk data kuantitatif, sedangkan data yang didapat dari hasil wawancara pada umumnya berupa data kualitatif. Untuk proses analisa, data disusun dan dikelompokkan dalam table sesuai dengan jenis dan kebutuhan. Untuk mengetahui keterkaitan antara variabel maka akan digunakan metode distribusi frekuensi yang berkaitan dengan analisis deskriptif

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, yang berisi; Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan sasaran penelitian, Ruang lingkup penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Struktur Sosial Masyarakat dan Dinas Kebersihan Kota Tanjungpinang yang berisi, Gambaran Umum Kota Tanjungpinang, Administrasi perkantoran, Tugas dan Peranan Dinas Kebersihan.

Bab III. Peningkatanlisasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang, yang berisi; Perencanaan dalam pengelolaan sampah, Masalah persampahan di Kota Tanjungpinang, Sistem pengelolaan sampah.

Bab IV. Analisis Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sampah Di Tanjungpinang yang berisi; Analisis mengenai terjadinya penimbunan sampah di Kota Tanjungpinang, Analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku para petugas kebersihan Kota Tanjungpinang Dalam Pengumpulan Sampah, Analisis terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah

Bab V. Kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

Kesimpulan berisikan beberapa penyebab tidak meningkatnya petugas pengumpul sampah rumah tangga, terbatasnya pemahaman tentang sampah, pengawasan yang belum ditingkatkan, waktu kerja yang terbatas dan keterbatasan sarana dan prasarana

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DAN MASALAH PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

2.1 Ciri-ciri Struktur Sosial Masyarakat Perkotaan

Kota merupakan sebuah ekosistem sosial ekonomi dan manusia yang dinamis dan kompleks, sebuah tempat pertemuan, tantangan, keramahtamahan, konfrontasi, dan emosi. Menurut Aristoteles; kota adalah "*politik yang dibangun*" disana terdapat interaksi yang kuat antara bentuk dan nilai-nilai politiknya yang mendominasi penyelenggaraannya. Sedangkan Jacobs, menggambarkan bahwa kota sebagai sebuah permukiman yang secara konsisten menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari ekonomi daerahnya sendiri, dan Mumford mendefinisikan kota sebagai bentuk dan symbol dari hubungan social yang terpadu.

Untuk mendapatkan keterpaduan itu, sesungguhnya konsep yang menyentuh itu adalah konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana Budihardjo dan Suyanto, 99 mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu interaksi antara tiga sistem: sistem biologis dan sumber daya, sistem ekonomi dan sistem sosial. Secara implisit juga mengandung arti bahwa untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam

Konsep pembangunan berkelanjutan yang menggantikan konsep pembangunan holistik, integral, dan asli. Mengandung prinsip menghubungkan

kota-kota. Dalam perkembangannya konsep ini lebih didefinisikan sebagai sebuah proses dan bukan sebagai titik akhir, sebagai sebuah perjalanan dan bukan sebagai arah tujuan. Menurut Komisi Eropa, lingkungan berkelanjutan tidak dapat digambarkan tanpa adanya keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Lingkungan berkelanjutan telah didefinisikan sebagai “keadilan terus-menerus hingga ke masa depan”. Piagam kota-kota Eropa berkelanjutan menggambarkan berkelanjutan sebagai sebuah proses kreatif yang mencari keseimbangan yang luas hingga ke seluruh bidang pembuatan keputusan daerah. Lingkungan yang sehat, keadaan sosial yang terpadu, dan efisiensi ekonomi, evolusi yang harmonis, yang didasarkan pada kewargaan yang aktif, merupakan pilar kesinambungan perkotaan (Vaula Mega, 2003: 58).

Keberhasilan masyarakat berwawasan lingkungan memunculkan harapan regenerasi dan pembangunan kembali perkotaan. Kota tidak semata-mata hanya merupakan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga harus dibentuk kembali sebagai sivitas, tempat peradaban. Ungkapan seperti “*kotamartir*” atau bahkan “pemusnahan perkotaan” merupakan sesuatu yang signifikan, tetapi setidaknya kota memiliki kemampuan untuk memperbaharui dirinya sendiri. Pembangunan kembali perkotaan dibutuhkan untuk mengembalikan keselarasan bagi kota-kota yang sering menderita akibat adanya pembagian yang tegas antara inti sejarah dan rumah-rumah yang tidak tertata, pekerjaan yang terpecah, daerah satelit yang bergantung pada banyaknya kendaraan bermotor. Pembangunan tidak dapat pula dipahami tanpa memikirkan kembali kota, bentuknya, dan fungsinya secara menyeluruh.

Sudut pandang dalam mengidentifikasi jenis-jenis strategi yang sekarang mungkin berhasil menyampaikan masalah utama lingkungan di kota-kota di negara-negara berkembang di seputar wilayah Asia Pasifik, adalah menyalurkan dukungan yang lebih besar secara langsung kepada warga negara dan kelompok aksi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya segera memberikan keuntungan secara lebih murah dan efektif bagi masyarakat perkotaan yang berpenghasilan rendah dibandingkan dengan langkah-langkah yang dibuat oleh Negara, tetapi juga memperkuat masyarakat dengan cara mengembangkan kemitraan antara organisasi yang berbasis masyarakat, LSM, dan pemerintahan kota praja. Gerakan untuk reorientasi pembangunan di seputar kelompok warga masyarakat ini muncul segera sesudah sejumlah proyek berhasil diperkenalkan dan dikelola oleh LSM. Kelompok-kelompok inilah yang bekerja sama dengan warga Negara yang berpenghasilan rendah dan organisasi-organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, selain membangun infrastruktur serta pelayanan perkotaan yang diperlukan.

Bagaimanapun, mengidentifikasi kebutuhan tersebut untuk pendekatan yang lebih bersifat partisipasi muncul jauh lebih sederhana dibandingkan dengan reorientasi agenda pembangunan pemerintah nasional atau mengubah perilaku kaum profesional, seperti misalnya; insinyur, arsitek dan perencana pembangunan yang berpihak bekerja sama dengan kelompok warga Negara di kota-kota dunia ketiga. Hal ini, terutama sekali, merupakan kasus di banyak Negara yang tetap menganut asas sentralistis dalam membuat kebijakan atas penggunaan tanah dan isu pembangunan di kota-kota. Partisipasi warga Negara

sangat minim bahkan ketika sebagian besar orang hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun seandainya terjadi perbaikan dalam pemerintah lokal, kota dan nasional, maka mereka bisa saja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memperbaiki lingkungan di berbagai kota, khususnya di negara-negara berkembang.

Masyarakat perkotaan mempunyai ciri-ciri struktur sosial yang antara lain (Daldjoeni, 1997) sebagai berikut :

1. Heterogenitas sosial penduduk kota yang terdiri dari bermacam-macam suku atau ras, tingkat sosial dan budaya.
2. Hubungan sekunder, yaitu pengenalan dengan orang lain serba terbatas dalam bidang kehidupan tertentu saja.
3. Pengawasan sekunder, yaitu orang yang hidup di kota sering tidak memperdulikan perilaku pribadi sesamanya, kontrol sosialnya bersifat pribadi, asal tidak merugikan bagi umum, maka tindakan tersebut dapat ditoleransikan.
4. Toleransi sosial, orang kota secara fisik berdekatan tetapi secara sosial berjauhan. Sehingga toleransi antar anggota masyarakat kurang.
5. Mobilitas sosial, dimana orang menginginkan kenaikan jenjang kemasyarakatannya (status sosial). Kehidupan di kota segalanya diprofesionalkan, dan melalui profesinya itu orang dapat menaikkan posisinya.
6. Ikatan sukarela, yaitu secara sukarela orang dapat menggabungkan diri kedalam perkumpulan yang disukainya.
7. Individualisasi, yaitu orang dapat memutuskan segala sesuatu secara pribadi, merencanakan karier tanpa desakan dari orang lain.

8. Segregasi keruangan, yaitu kompetisi keruangan yang menyebabkan terjadinya pola sosial berdasarkan persebaran tempat tinggal sekaligus kegiatan sosial ekonomi.

2.1.1 Tiga Aspek Pembangunan Masyarakat

Cita-cita utama dari pembangunan berkelanjutan tidak lain dalam upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan. Gagasan dibalik itu adalah bahwa pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, dan karena itu unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. Pada dasarnya yang mau dicapai dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi, juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan.

Dengan kata lain, yang ingin dicapai disini adalah sebuah integrasi pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan kedalam arus utama pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi. Pesan yang hendak disampaikan disini bahwa pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi.

Pola *developmentalism* yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan

yang lebih *holistic* dan *integrative* dengan memberi perhatian yang serius kepada pembagian sosial-budaya dan lingkungan. Hal ini terutama karena kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini telah membawa kerugian yang sangat mahal di sisi sosial – budaya dan lingkungan. Kehancuran sosial - budaya dan lingkungan telah menyebabkan negara dan masyarakat membayar mahal, tidak hanya dalam hitungan nilai finansial tetapi juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan di banyak negara yang sedang berkembang.

Dampak lanjutannya adalah: *Pertama*, terjadinya kemiskinan yang semakin mendalam di banyak negara berkembang, tidak saja karena kekayaan sumber daya alamnya terkuras habis untuk membayar hutang luar negerinya, melainkan karena kemerosotan sumber daya alam itu membuat mereka semakin tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Tingkat pendidikan mereka pun tetap rendah, karena mereka tidak mampu membayar tingkat pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya. *Kedua*, timbulnya berbagai penyakit yang terkait langsung dengan mutu pencemaran lingkungan. *Ketiga*, kehancuran sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat disekitarnya yang sangat bergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman tersebut. Akibatnya juga terancam, sebagaimana terancamnya aksistensi mereka oleh punahnya keanekaragaman hayati itu.

Konflik sosial-budaya yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini dapat dilihat pula sebagai resiko yang harus dibayar oleh diabaikannya pembangunan sosial-

budaya selama ini. Perasaan ketidakadilan, termarginalisasi, dan terancam secara budaya yang dialami oleh kelompok-kelompok budaya tertentu adalah merupakan bagian dari proses nasional. Hal ini sebuah dampak negatif dari pembangunan yang sangat mahal.

Dari segi lingkungan hidup, Indonesia menghadapi problem-problem serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, penimbunan sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Kesemuanya ini merupakan dampak yang dibayar sangat mahal dari terbaikannya aspek lingkungan dalam keseluruhan proses pembangunan. Hal ini belum termasuk gangguan penyakit dan menurunnya kualitas kehidupan manusia akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kerugian yang disebabkan oleh diabaikannya pembangunan aspek-aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan ini, seandainya dapat dikalkulasikan secara teliti, barangkali akan membuat bangsa Indonesia akan terkejut. Jika itu diukur, maka akan dapat dilihat bahwa apa yang selama ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi positif dengan 7 persen, misalnya; sesungguhnya adalah pertumbuhan yang negative. Sedangkan biaya untuk kerugian sosial-budaya dan lingkungan ternyata sangat mahal. Berarti, pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut ternyata semu dan berarti sia-sia bangsa Indonesia membangun kalau pada akhirnya yang dituai adalah kerusakan sosial-budaya dan kerusakan lingkungan, selain perbaikan kesejahteraan ekonomi-material pada kelompok tertentu masyarakat Indonesia .

Selain kekeliruan yang terdapat dalam masalah pemberian prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu kekeliruan lainnya adalah berasal dari pola pembangunan yang telah dijalankan selama ini, yaitu mengenai persepsi yang keliru tentang keyakinan alam. Perhatian utama pembangunan ekonomi hanya tertuju pada perbaikan standar kehidupan, khususnya standar material. Hal yang menjadi pusat perhatian dari seluruh proses pembangunan tercapainya kesejahteraan material. Tujuan ini seakan-akan hanya inilah yang dikejar dalam dan yang utama bagi kehidupan masyarakat. Aspek-aspek lain dari kesejahteraan manusia, seperti kemajuan budaya, spiritual, dan estetik manusia, tidak mendapat perhatian sama sekali. Dengan kata lain, yang dituju oleh *Deep Ecology*, melainkan perbaikan standar kehidupan material. Hal yang dikejar adalah uang, materi dan kemewahan, serta jalan untuk itu adalah dengan menguras habis kekayaan alam yang ada, yang direduksi semata-mata bernilai ekonomis saja.

Pola pembangunan yang demikian, justru semakin memacu materialisme dan menyuburkan pola produksi dan konsumsi eksekif dengan akibat alam menjadi obyek eksploitasi yang eksekif pula. Pola produksi dan konsumsi ini, ternyata menjadi semakin terpenuhi akan menjadi semakin tak terpuaskan. Hal ini berarti, semakin banyak kekayaan alam yang di eksploitasi, akan semakin rakus dan tamak pula perilaku manusia, sehingga semakin rusak pula lingkungan hidup disekitarnya. Pola produksi dan konsumsi yang bersifat eksekif dari negara-negara industri maju yang kemudian ditiru begitu saja oleh negara-negara yang sedang berkembang dan dianggap sebagai jalan yang harus ditempuh oleh negara-negara yang sedang berkembang. Bersamaan dengan itu, kemajuan dipahami sebagai

ekonomi dan material. Keterbelakangan suatu negara dipahami dalam kerangka keterbelakangan ekonomi dan material tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika negara-negara sedang berkembang pun tidak punya pilihan lain daripada beramai-ramai mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju dengan memacu pertumbuhan ekonominya, yang tidak lain berarti memaksimalkan kegiatan eksploitasi sumber daya alamnya.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi semua negara sedang berkembang adalah kemiskinan dari sebagian besar rakyatnya. Untuk mengatasi masalah besar ini, memang pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan. Kesalahan di sini adalah, kemiskinan selalu dipahami sebagai kemiskinan dari segi material-ekonomis. Padahal kemiskinan itu sendiri mempunyai dimensi yang lebih luas dan karena itu pola penanganannya pun tidak boleh direduksi hanya sebatas menyangkut aspek material-ekonomis. Dimensi sosial-budaya, spiritual, dan kualitas lingkungan harus pula mendapat perhatian. Demikian pula masalah kemiskinan tidak boleh direduksi hanya sebagai dapat diatasi dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Terdapat banyak variable dan faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan sebuah negara dalam mengatasi kemiskinan. Kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah yang tinggi merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Dengan kata lain, bukan hanya sumber daya alam yang harus ditingkatkan. Kemampuan manusia pun harus dikembangkan di ditingkatkan agar tekanan kepada sumber daya alam dalam mengatasi kemiskinan dapat diperkecil.

Aspek pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup perlu sekali mendapat perhatian karena pembangunan selalu akan mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial-budaya suatu masyarakat serta lingkungan hidup. Dampak itu tidak hanya berupa termarginalisasinya suatu kelompok sosial-budaya melainkan juga bahkan terancam punahnya kelompok masyarakat tersebut. Demikian pula halnya dengan lingkungan, bahkan kerusakan lingkungan secara fisik, seperti karena timbunan sampah yang menggunung, akan dapat berakibat rusaknya atau hilangnya suatu keindahan alam di suatu tempat, bahkan lebih dari itu menyebabkan hilang dan punahnya unsur eksistensi kehidupan kelompok budaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketiga aspek pembangunan ini harus mendapat perhatian secara serius.

Integrasi ketiga aspek pokok tersebut tidak berarti bahwa bangsa Indonesia tidak menganggap penting pembangunan ekonomi. Justru sebaliknya, dengan integrasi ketiga aspek tersebut, kemajuan dan prestasi ekonomi yang dicapai justru akan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala dimensinya dan sekaligus bisa lebih berkelanjutan. Dengan integrasi tersebut, maka pembangunan ekonomi pun diletakkan dalam kerangka lingkungan hidup dan sosial-budayanya.

Selain integrasi ketiga aspek tersebut, pembangunan berkelanjutan juga dipahami sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan produktif dari ekonomi nasional pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah suatu pola dan strategi pembangunan nasional yang menjamin kemampuan ekonomi di masa depan tidak berkurang sama sekali.

Jadi, generasi yang akan datang masih mempunyai peluang dan kemampuan ekonomi yang sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya yang sama seperti generasi sekarang. Untuk itu, kemampuan yang ada baik dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi tidak akan berkurang untuk generasi yang akan datang. Seandainya berkurang, maka kemampuan itu dapat dikompensasikan dalam bentuk tertentu.

2.1.2 Tiga Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan diatas dapat dipenuhi, dan dalam arti bahwa ketiganya hanya mungkin dapat dicapai jika ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan.

Prinsip yang pertama adalah demokrasi. Prinsip ini menjamin agar dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Sebuah prinsip moral yang paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan mempunyai peluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap banyak bahwa pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan. Ada kemungkinan bahwa dalam sistem politik dan kekuasaan yang otoriter, dengan pemimpin yang mempunyai komitmen yang kuat kepada pembangunan berkelanjutan, akan dengan serta merta dirancang

struktur, organisasi dan mekanisme politik untuk mewujudkan paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut. Keberkelanjutan pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri sangat rentan karena sangat tergantung pada kekuasaan dan kemauan politik penguasa. Selama dia masih berkuasa, maka pembangunan tersebut akan dapat diwujudkan. Begitu sudah tidak berkuasa lagi, maka akan berganti sesuai dengan keinginan politik pemimpin yang baru.

Terdapat beberapa aspek penting dari prinsip demokrasi tersebut. *Pertama*, agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat, yaitu demi kepentingan rakyat. Pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat demi kepentingan. Pemerintah hanyalah pelaksana agenda pembangunan yang diamanatkan oleh rakyat. Jadi pemerintah harus menjamin bahwa agenda dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang benar-benar berasal dari rakyat dan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan adalah sebuah keharusan moral dan politik. Masyarakat tidak boleh hanya dilibatkan dalam mengimplementasikan agenda pembangunan dari pemerintah, melainkan juga menentukan dan merumuskan agenda pembangunan tersebut, bukan hanya sekedar ikut menentukan dan merumuskan. Dengan demikian, berarti proses perencanaan (termasuk perencanaan menyangkut prioritas pembangunan) dan implementasinya harus dilakukan secara aspiratif. Hal ini jauh lebih penting dari pada hasil instant yang tidak menyangkut kepentingan bersama, yang holistic dan berjangka panjang kedepan. *Ketiga*, harus ada akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda

pembangunan dan proses perumusan agenda pembangunan itu. Transportasi publik lalu menjadi suatu keharusan dalam prinsip demokrasi. Gagasan besar mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar merupakan sebuah tuntutan moral dari demokrasi dan pembangunan itu sendiri. *Keempat*, ada akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan pembangunan dan implementasi pembangunan tersebut. Akuntabilitas publik merupakan konsekuensi logis dari prinsip demokrasi dalam pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan berasal dari rakyat demi kepentingan rakyat banyak, harus ada pertanggungjawaban publik tentang sejauh mana aspirasi rakyat telah didengar, diakomodasikan, dan diwujudkan serta sejauh mana tujuan pembangunan-kepentingan bersama seluruh rakyat telah benar-benar diwujudkan dengan komitmen dan upaya yang serius pada semua pihak. Hal ini dapat diukur pula dengan sejauh mana pemerintah telah memobilisasikan seluruh kekuatan dan potensi yang ada dalam masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan yang ada (Keraf, 2001: 9-10).

Menurut A. Sony Keraf, hanya dengan cara tersebut rakyat akan tahu mengenai agenda pembangunan beserta segala konsekuensi, pilihan terbaik, dan proses menuju pencapaian hasil-hasil pembangunan, serta aspirasinya ikut diakomodasikan. Yang lebih penting dari itu, adalah rakyat mempunyai komitmen untuk mengimplementasikannya, karena mereka terlibat dalam proses perumusannya. Selama pembangunan bersifat elitis dan berasal dari atas, maka akan sulit sekali mengharapkan keterlibatan rakyat dalam mewujudkan pembangunan tersebut.

2.1.3 Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah memasukkan faktor lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, maka dampak negatif yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat dibatasi sampai pada batas yang minimum. Pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, pelaksanaannya menghadapi hambatan besar. Para birokrat, pakar ekonomi, usahawan dan bahkan juga para pakar dibidang lingkungan hidup berpegangan pada tesis bahwa melindungi lingkungan hidup memerlukan biaya, baik biaya riil maupun biaya kesempatan (*opportunity cost*). Misalnya; pembangunan pengolahan limbah atau sampah yang membutuhkan biaya. Dengan demikian, pembangunan ramah lingkungan dianggap memerlukan biaya tambahan yang besar jumlahnya. Sebagai bangsa yang masih berada dibawah garis kemiskinan, maka kita belum mampu menyediakan biaya tambahan untuk pembangunan ramah lingkungan tersebut. Sehingga dirasa sangat sulit untuk melaksanakan program pembangunan ramah lingkungan tersebut (Soemarwoto, 2004: 75).

Konsep yang dikembangkan oleh kalangan para pakar lingkungan hidup yang menyatakan bahwa konsevasi lingkungan hidup tidak berarti membiarkan sumber daya alam tidak berguna bagi pembangunan, tidak banyak membantu untuk mengatasi kontroversi lingkungan hidup dan pembangunan. Berdasarkan pada anggapan bahwa adanya konversi ini kita diharuskan memilih antara pembangunan terlebih dahulu atau lingkungan hidup yang didahulukan. Karena

taraf hidup kita yang masih rendah, maka pembangunan haruslah didahulukan. Pemerintah pun memberikan prioritas utama pada pembangunan ekonomi sehingga jika ada kontroversi antara pembangunan dan lingkungan hidup, maka lingkungan hiduplah yang dikalahkan.

Sikap yang tidak ramah pada lingkungan hidup ini, meluas pada masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan pribadi banyak dari anggota masyarakat yang merusak lingkungan, meskipun tahu akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk memaksimalkan keuntungannya, para pengusaha merasa tidak bersalah merusak lingkungan hidup. Para aktivis lingkungan hidup di kalangan akademik dan LSM selalu dianggap sebagai penghambat pembangunan.

2.2 Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan perkampungan penduduk di kota tidak akan terlepas dari perkembangan kota itu sendiri. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang membahas tentang perkembangan kota telah banyak dikemukakan oleh para ahli, yang antara lain oleh Prof. Vincent Van Romont, menjelaskan bahwa kota-kota di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. *Pertama*, kota-kota yang bertipe barat contohnya seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan sebagainya. *Kedua*, kota-kota yang bertipe asli Indonesia contohnya seperti; Pekanbaru, Tanjungpinang, Tanjung Balai, dan wilayah kota-kota lainnya.

Mengenai kota dapat dinilai dengan cara berdasarkan pada:

1. Lingkungan fisik asli kota itu sendiri.

2. Tingkat urbanisasi dan kelas-kelas sosial yang terjadi
3. Perkembangan kebudayaan.

Menurut H.F. Tillema dalam bukunya "Kromoblanda" dijelaskan bahwa kota-kota yang bertipe barat itu berbentuk konsentrik yang terdiri dari empat lapis lingkaran. *Lingkaran Pertama*, merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan pemerintah. Di pusat ini tersedia berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kekuatan dan kekuasaan pemerintah, yang pada waktu itu adalah Belanda. *Lingkaran Kedua*, adalah tempat tinggal para priyayi, bangsawan, pejabat, pribumi, intelektual dan pedagang atau pengusaha kaya. *Lingkaran Ketiga*, adalah tempat tinggal penduduk asli Indonesia. *Lingkaran Keempat*, adalah tempat yang masih bersifat desa (*rural*).

Perencanaan dalam pengelolaan sampah disuatu daerah tertentu tidak dapat dirancang oleh dinas yang berwenang saja tanpa melibatkan instansi-instansi yang lain. Instansi-instansi yang perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana secara umum yaitu: Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Alasan mengapa diperlukannya perencanaan dengan melibatkan berbagai instansi terkait itu, adalah untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian dan tumpang tindih suatu kebijakan yang mungkin terdapat perbadaan. Adapun tujuan umum dari perencanaan bersama ini adalah untuk melindungi dan mempertinggi nilai lingkungan tanah, udara, air, dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan sampah merupakan suatu proses untuk mengembangkan rencana-rencana dan program-program tertentu yang dapat

dikerjakan. Yang dimaksud dengan pengertian dapat dikerjakan adalah keadaan yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di suatu daerah. hal ini bergantung dari kemampuan anggaran, tersedianya fasilitas, tenaga dan sebagainya.

Dalam pembahasan tentang perencanaan pengelolaan sampah, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Beberapa istilah penting yang erat hubungannya dengan perencanaan pengelolaan sampah ini, antara lain :

1. Elemen fungsional, adalah suatu elemen yang digunakan untuk menggambarkan bermacam-macam aktifitas yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, mulai dari timbulan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah ketempat pembuangan akhir. Ada enam elemen fungsional, yaitu; 1) aktifitas-aktifitas penimbunan sampah, 2) penyimpanan setempat, 3) pengumpulan, 4) pengangkutan, 5) pengolahan dan pengambilan kembali bahan-bahan yang berguna, dan 6) pembuangan akhir.
2. Sistem, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bahan-bahan yang saling bergantung satu sama lainnya, dan saling berinteraksi yang secara keseluruhan mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal pengelolaan sampah, maka bagian-bagian yang paling bergantung tersebut adalah elemen-elemen fungsional.
3. Program, adalah program dalam perencanaan pengelolaan sampah yang terdiri dari semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dari suatu elemen fungsional atau sistem pengelolaan sampah.
4. Alternatif, istilah alternatif ini digunakan untuk menggambarkan berbagai penggolongan program-program yang terdapat dalam rencana-rencana untuk

membuat perbandingan. Dengan membandingkan alternatif-alternatif yang tersusun dalam suatu program, sehingga memungkinkan para pembuat keputusan untuk menaksirkan pengaruh pembuangan sampah secara sembarangan.

2.3 Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian dan Jenis Sampah

Sampah adalah barang-barang buangan atau barang yang oleh pemiliknya telah dibuang dengan maksud tidak dimanfaatkan lagi. Berdasarkan sumbernya sampah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sampah rumah tangga (domestik), sampah pasar, sampah industri, sampah pertokoan, dan kantor (komersial), sampah taman dan sampah jalan. Sedangkan berdasarkan karakteristik kimiawinya sampah dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sampah yang mudah membusuk atau akan terdegradasi oleh mikroba yang hidup di alam. Sampah anorganik adalah sampah kering dan tidak akan terurai oleh mikro organisme di alam, misalnya besi, kaca, kaleng, plastik dan sebagainya (BPPT, 1996).

Sampah diartikan juga sebagai barang buangan dari aktifitas manusia, merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang dan merupakan barang yang sudah tidak berguna (Sudarso, 1995). Jenis dan karakteristik sampah dapat diketahui dengan melihat sumber dan jenis sampah, komposisinya serta banyaknya sampah yang dihasilkan oleh setiap jenis sumber

tersebut. Sumber sampah diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu pemukiman penduduk, tempat-tempat umum, dan tempat perdagangan, sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, industri serta pertanian (Sudarso, 1995).

Sampah atau refuse adalah zat padat atau semi padat yang terbuang atau yang sudah tidak berguna baik yang dapat membusuk maupun yang tidak dapat membusuk kecuali zat padat buangan atau kotoran yang keluar dari tubuh manusia (tinja), dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampah dapat diartikan sebagai benda yang tidak diinginkan lagi sebagai hasil dari kegiatan atau aktifitas manusia.

Secara umum pengertian sampah dapat diartikan sebagai bahan buangan yang tidak disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana sebagian besar merupakan bahan atau sisa yang sudah tidak dipakai lagi dan akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat (*Institute of Waste of America Public Workes Association*, 1170).

2.3.2 Sumber Sampah

Penghasil sampah adalah setiap orang / badan yang menghasilkan sampah, yang dapat berasal dari rumah tangga (domestik), pasar, industri, atau komersial (Murdiriyanto, 1996)). Sedangkan menurut Syafrudin, sumber sampah dapat berasal dari domesitik (rumah tangga), instansi (sekolah, kantor), komersial (pasar, toko). Industri, pertanian, aktifitas perkotaan (penyapu jalan). Sumber penghasil sampah menurut Sudarso diklasifikasikan dalam beberapa kategori,

yaitu permukiman penduduk tempat-tempat umum dan tempat perdagangan, sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. Industri serta pertanian.

Menurut Kusnoputranto (Kesehatan Lingkungan, 2000), sumber sampah berasal dari :

1. Sampah domestik (*domestic waste*), yaitu sampah padat yang berasal dari permukiman masyarakat. Jenis sampah padat ini cukup beragam, namun pada umumnya berupa sampah dapur dan sampah lain yang merupakan hasil kegiatan rumah tangga seperti; sisa makanan, sampah dari halaman seperti dedaunan, kaleng dan kardus, kertas serta kardus pembungkus, pakaian bekas, karpet tua, perabotan rumah tangga dan sejenisnya. Jenis sampah yang berasal dari permukiman kota pada umumnya berbeda dengan sampah yang ada di permukiman pedesaan. Pada sepuluh tahun terakhir ini sampah-sampah sisa dari kegiatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, alat pemanas air cenderung meningkat jumlahnya.
2. Sampah komersial (*commercial waste*), yaitu sampah padat yang berasal dari lingkungan atau jasa komersial, baik warung, toko maupun pasar. Sampah ini juga jenisnya beragam sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan. Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari kardus-kardus yang besar, kotak-kotak pembungkus, kertas-kertas karbon, pita mesin tik bekas dan sebagainya. Dalam hal ini termasuk juga sampah makanan dari kantin dan restoran.
3. Sampah yang berasal dari jalan-jalan raya (*street waste*), yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan-jalan. Biasanya terdiri dari kertas-kertas,

kardus-kardus kecil bercampur dengan bebatuan, debu, pasir, benda-benda yang jatuh dari truk / kendaraan, sobekan-sobekan ban atau onderdil-onderdil yang jatuh, juga dedaunan, sampah-sampah yang dibuang dari mobil, kantong-kantong plastik dan lain-lain.

4. Sampah-sampah yang berasal dari gedung perkantoran (*institutional waste*), yaitu terdiri dari kertas-kertas, karbon-karbon pita-pita mesin tik, klip, dan lain-lain, pada umumnya bersifat rubbish, kering dan mudah terbakar.
5. Sampah yang berasal dari tempat umum seperti; sampah dari tempat hiburan, tempat-tempat olahraga, tempat-tempat ibadah dan sebagainya yang dapat berupa kertas, sisa buah-buahan, plastik dan lain-lain.

Jumlah produksi sampah untuk setiap daerah di Indonesia diperkirakan sekitar tiga liter per orang per hari. Untuk daerah Asia 350 gr / orang / hari. Jumlah produksi sampah padat suatu daerah bergantung pada beberapa faktor, antara lain :

1. Jumlah, kepadatan, serta aktivitas penduduk yang bersangkutan.
2. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang dipakai.
3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.

2.4 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan-kegiatan yang tidak hanya proses pengumpulan atau pengambilan sampah dari berbagai sumbernya, tetapi termasuk pengangkutannya sampai ke tempat-tempat untuk mengosongkan alat pengumpul sampah. Pada dasarnya dalam berbagai sistem pengumpulan, pengangkutan serta

pembongkarannya mempunyai kesamaan, yang berbeda adalah pengambilan sampah, bergantung dari pada karakteristik dari fasilitas, aktifitas atau sumber sampah dan cara yang digunakan untuk pengumpulan setempat (*on site storage*).

Tahap pengumpulan merupakan kelanjutan dari tahap penampungan. Sampah dari setiap tong/container dikumpulkan dalam alat pengangkutan sampah dan diangkut ketempat pengumpul sampah sementara untuk diproses lebih lanjut pada tahap. Selanjutnya pengumpulan dan pengangkutan sampah harus dilakukan secepatnya dan dilakukan secara rutin dan teratur. Apabila tahap ini tidak dapat dijalankan dengan baik, maka sampah akan bertumpuk dan menjadi tempat perkembangbiakan serangga.

Tempat pengumpulan sampah sementara harus mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah. Besar atau luasnya tempat pengumpulan sampah harus disesuaikan dengan jumlah timbulan sampah pada setiap harinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada sampah yang melimpah akibat tempat pengumpul sampah tersebut tidak dapat menampung sampah dari masing-masing sumber. Apabila sampah yang dihasilkan setiap harinya cukup banyak, maka sebaiknya dibuat rumah sampah atau *garbage house* sebagai tempat pengumpul sampah sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari penghasil / sumber sampah dengan pengangkutan sampah ke lokasi pengolahan atau pembuangan akhir. Pengumpulan sampah merupakan yang utama dan paling menentukan dalam penanganan sampah. Kegiatan pengumpulan sampah mencapai 70 % dari semua kegiatan pengelolaan sampah dengan biaya mencapai 80 % dari semua

dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah (Sudarso, 1995).

Cara atau pola pengumpulan sampah di setiap kota atau daerah mungkin sama / mirip bahkan berbeda sama sekali. Perbedaan pola pengumpulan sampah di setiap kota atau daerah ditentukan dengan banyak faktor di suatu daerah (Murdiriyanto, 1996), antara lain :

1. Karakteristik lingkungan fisik dan ekonomi,
2. Pengaturan setempat,
3. Kebiasaan masyarakat,
4. Kepadatan dan persebaran penduduk,
5. Karakteristik timbulan sampah,
6. Sarana dan prasarana (sarana angkutan, sarana TPS, prasarana jalan).

Kegiatan pengumpulan sampah sangat ditentukan oleh beberapa faktor (Sudarso, 1995). Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Jenis perlengkapan / sarana yang akan digunakan,
2. Tenaga dan Kepadatan penduduk di daerah pengumpulan,
3. Topografi daerah,
4. Faktor iklim (curah hujan, suhu, kecepatan angin),
5. Jarak antar tempat-tempat pengumpulan sementara

Pola pengumpulan sampah pada dasarnya ada dua macam, yaitu pola individu dan pola komunal (YUIMS, 1999). Pola individu terdiri dari pola individual langsung atau sistem *door to door* dan pola individual tidak langsung atau sistem jemput bola. Sedangkan pola komunal terdiri dari pola komunal langsung dan pola komunal tidak langsung atau jali-jali. Pola individu langsung

yaitu pengumpulan sampah dengan truk sampah yang langsung mengumpulkan sampah dari masyarakat atau rumah-rumah. Pola ini dilakukan pada masyarakat yang tinggal ditepi jalan utama / besar yang dapat dilalui oleh truk sampah. Pola individu tak langsung yaitu pengumpulan sampahnya dengan gerobak sampah pada masing-masing rumah, selanjutnya sampah diangkut ke transfer depo. Pola ini dilakukan pada daerah perumahan atau permukiman yang cukup padat dengan jalan yang cukup padat dengan jalan yang sempit dimana truk sampah tidak dapat masuk sampai pada masing-masing rumah. Pada sistem komunal langsung ini juga sering diterapkan pada daerah yang kesulitan untuk mencari tenaga penarik gerobak sampah, selanjutnya selanjutnya sampah diangkut ke transfer depo.

Pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat menggunakan kendaraan kecil (gerobak) dan kendaraan besar (*truck*) harus diperhatikan dan diperhitungkan terhadap kapasitas angkut, jarak tempuh, keinginan warga serta pendukung lainnya di masing-masing wilayah (YUIMS, 1999). Pola individu terdiri dari pola individual langsung atau *system door to door dam*. Pola individual tidak langsung atau sistem jemput bola. Sedangkan pola komunal terdiri dari pola komunal langsung langsung dan pola komunal tidak langsung atau jali-jali. Pola individu langsung yaitu pengumpulan sampah dengan truk sampah yang langsung yang dilakukan pada penduduk atau rumah-rumah.pola ini dilakukan pada penduduk yang berada di jalan utama / besar yang bisa dilalui truk sampah. Pola individu tak langsung yaitu pengumpulan sampah dengan gerobak sampah pada masing-masing rumah, selanjutnya sampah diangkut ke transfer depo. Pola ini dilakukan pada daerah perumahan atau permukiman yang cukup

padat dengan jalan yang sempit dimana truk sampah tidak bisa masuk. Pola komunal langsung, yaitu pengumpulan sampah dengan cara masing-masing penduduk langsung membawa sampahnya ke transfer depo atau kontainer. Pola ini biasa dilakukan pada daerah permukiman padat dimana gerobak sampah tidak bisa masuk sampai pada masing-masing rumah. Pola komunal langsung ini juga sering diterapkan pada daerah yang kesulitan untuk mencari tenaga penarik gerobak.

Pola komunal tidak langsung, yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masing-masing penduduk langsung ke gerobak sampah, selanjutnya sampah diangkut ke transfer depo. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat menggunakan kendaraan kecil (gerobak) dan kendaraan besar (truk) harus diperhatikan dan diperhitungkan kapasitas angkut, jarak tempuh, keinginan warga serta sarana pendukung lainnya pada masing-masing wilayah (YUIMS, 1999).

Menurut Sudarso, sistem pengumpulan sampah terdiri dari dua sistem yaitu, *Houl Container System* dan *Stationary Container System*. *Houl Container System* adalah pengumpulan sampah dimana bak-bak pengumpulan sementara ikut terangkut ketempat pengolahan atau pembuangan akhir. Sedangkan *Stationary Container System* adalah sistem pengumpulan sampah dengan membongkar isi sampah di tempat. Untuk sistem yang pertama banyak diterapkan pada negara-negara yang sudah maju, sedangkan pada negara berkembang (misalnya Indonesia) banyak menggunakan sistem yang kedua.

Pengumpulan sampah juga dapat dilakukan berdasarkan sumber sampahnya, yaitu sampah rumah tangga, sampah permukiman, sampah komersial,

sampah perkantoran, sampah industri dan sampah jalanan serta sampah lainnya (Gumbiro, 1986).

Sampah rumah tangga biasanya berasal dari sisa sayuran, buah-buahan serta sisa-sisa makanan. Selain itu dapat juga terdiri dari plastik pembungkus, kertas, kaleng, potongan kayu, pakaian usang, logam dan sebagainya. Sampah organik yang biasanya berasal dari kegiatan dapur sebaiknya dimasukkan kedalam kantong plastik, tidak ditumpuk di dalam tong sampah sehingga tidak menimbulkan bau. Sedangkan sampah kering dapat disimpan dalam tong / bak sampah.

Sampah pemukiman berasal dari sampah rumah tangga dalam area satu Rukun Tetangga (RT) atau satu Rukun Warga (RW). Wadah yang dapat digunakan adalah bak penampungan sementara, yang dapat terbuat dari semen atau besi. Volume bak penampungan harus ditempatkan di dekat jalan umum jaraknya tidak terlalu jauh sehingga gerobak dapat menjangkaunya.

Sampah komersial memiliki keragaman yang sangat besar, sehingga pengumpulan sampahnya sebaiknya harus sudah lebih terklasifikasikan lagi. Pewadahan khusus secara terklasifikasi harus dapat dikerjakan oleh penghasil sampah, baik restoran, toko-toko, warung dan pasar swalayan, sedangkan sampah organik yang basah (sayuran, buah-buahan, ikan dan daging) harus ditangani secara sendiri. Sampah organik darat diangkut ke tempat penanganan selanjutnya, sedangkan sampah anorganik yang dapat di daur ulang (kertas, karet, logam, kaca serta plastik) disendirikan untuk dijual ke pedagang pengumpul barang bekas.

Sampah perkantoran dan sekolahan pada umumnya berbentuk kertas dan karton, sehingga dapat dikumpulkan dalam karung-karung goni untuk dijual ke pedagang pengumpul barang bekas atau dijual ke pabrik kertas kembali guna dibuat bubur kertas (*pulp*).

Sampah industri sangat beragam dan tergantung pada industrinya itu sendiri. Biasanya setiap industri itu memiliki sarana penampungan dan penanganan sampah. Sampah industri lebih mudah diklasifikasikan, biasanya barang-barang yang masih bernilai ekonomi sudah ada jalur pemasarannya. Untuk agroindustri harus memiliki armada pengangkutan sampah sendiri. Untuk industri yang menghasilkan sampah beracun harus ada pengawasan secara ketat oleh instansi terkait.

Sampah jalanan biasanya terdiri dari kertas, plastik dan dedaunan. Pengumpulannya dilakukan penyapuan, kemudian diangkut dengan truk atau gerobak. Penyapuan jalan harus dilakukan pada jam-jam yang tidak terlalu sibuk, sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan harus dilakukan setiap hari.

Sampah lain yang dimaksud adalah sampah yang dihasilkan oleh tempat-tempat rekreasi, baik di gunung, tepi pantai dan taman-taman, sampah-sampah di terminal bus, stasiun kereta api, terminal udara atau kendaraan untuk transportasi. Untuk pengumpulan sampah biasanya disediakan tong-tong sampah yang ringan, mempunyai kapasitas kecil, tetapi terawat baik. Manajemen pengelola tempat rekreasi harus mempunyai cara pengelolaan sampah dengan baik, sehingga jumlah pengunjung tetap tinggi. Dalam kendaraan transportasi umum sebaiknya

disediakan kantong sampah khusus, sehingga penumpang-penumpang tidak membuang sampah secara sembarangan keluar jendela.

Proses pengolahan sampah harus dipikirkan lebih dahulu, sebelum sampah dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA), agar tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Kunci dari pengolahan sampah adalah pemilahan sampah, sehingga pengolahan sampah dilakukan sesuai dengan karakteristiknya. Sedangkan sampah anorganik dapat diproses sesuai dengan karakteristiknya untuk dijadikan bahan baku industri lagi (BPPT, 1996). Pemilihan sampah seharusnya sudah dilaksanakan mulai dari penghasil sampah. Dengan demikian, maka akan mempermudah dan menghemat biaya dalam penanganannya serta lebih sehat.

Pengumpulan sampah dari sumber-sumbernya ketempat yang telah ditentukan merupakan sub sistem tersendiri. Penggolongan sistem pengumpulan sampah dapat dibagi menurut beberapa sudut pandang, seperti cara operasi peralatan yang digunakan dan jenis sampah yang dikumpulkan.

Tentang sistem pengumpulan sampah menurut cara operasionalnya, ada dua macam cara yang digunakan, yaitu sistem kontainer diangkut dan sistem kontainer tetap.

1. Sistem container diangkut (*hauled container system*), yaitu container yang digunakan untuk menyimpan sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir, dikosongkan ditempat tersebut dan dikembalikan ketempat semula atau ketempat lain. Sistem ini baik digunakan untuk memindahkan sampah dari sumber-sumber sampah yang menghasilkan sampah banyak, sebab relatif kontainer yang digunakan besar. Penggunaan kontainer yang besar akan

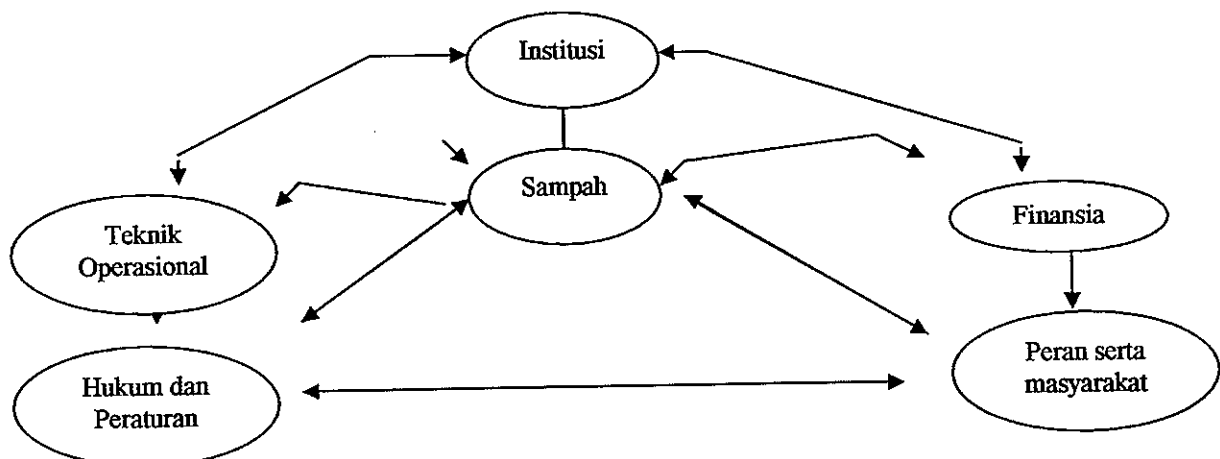
menghemat waktu, karena tidak menangani sampah sampah yang teronggok dan keadaan yang tidak saniter lainnya yang disebabkan oleh penyimpanan sampah pada kontainer-kontainer kecil. Container yang besar, semua jenis sampah dapat ditampung karena penggunaan container yang besar ini biasanya dilakukan secara manual, maka perlu dilengkapi dengan *platform* dan dijalankan melandai (*ramp*).

2. Sistem container angkut hanya memerlukan sedikit tenaga (satu truk oleh satu pengemudi), sehingga secara ekonomis sangat menguntungkan. Ada tiga macam *houled container system* yang utama, yaitu; 1) *host truck*, 2) *tilf frame*, 3) *trash trailer*. Sistem container tetap (*stationary container system*), yang tetap dapat digunakan untuk pengumpulan semua jenis sampah. Selain itu sangat bergantung pada jenis dan jumlah timbulan sampah yang ditangani. Ada dua macam bentuk dari sistem ini, yaitu yang menggunakan kompaktor otomatis dan yang menggunakan pengisian secara manual. Selain hal-hal tersebut, maka pada tahap ini yang perlu pula mendapat perhatian adalah frekuensi pengangkutan. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan, jangan sampai terjadi penumpukan-penumpukan sampah pada tempat pengumpul sampah. Karena dapat menimbulkan pengaruh gangguan bagi kesehatan manusia pada umumnya. Frekuensi pengangkutan sampah dilaksanakan pada macam dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan, jenis alat pengangkutan dan pada keadaan daerah setempat.

2.5 Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur. Komponen-komponen tersebut adalah sub sistem organisasi dan manajemen (sub sistem institusi), sub sistem teknik operasional (sub sistem teknik), sub sistem pembiayaan (sub sistem finansial), sub sistem hukum dan peraturan (sub sistem hukum) dan sub sistem peran serta masyarakat (Syafudin, 1999).

Hubungan antar komponen sub sistem komponen-komponen pengelolaan sampah perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.

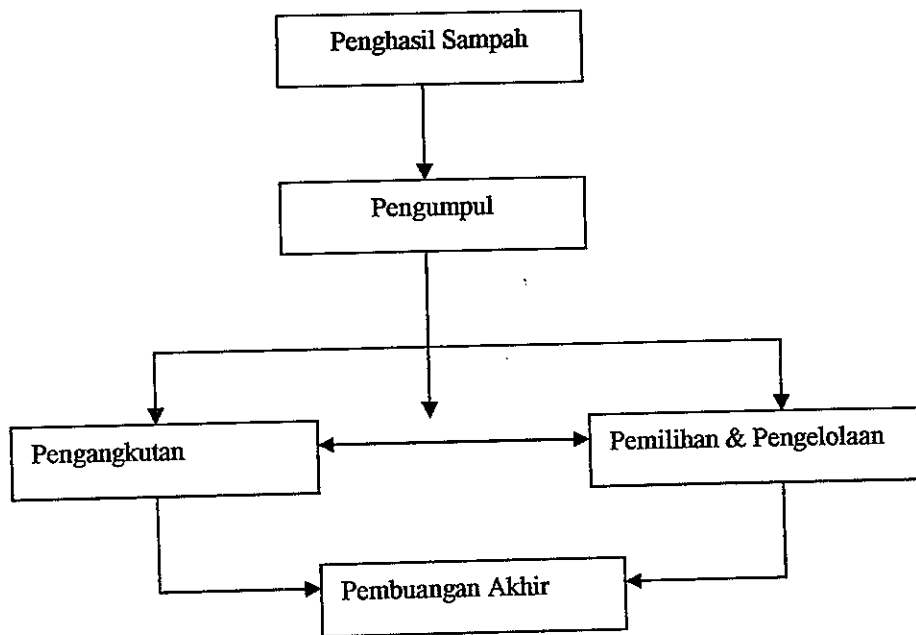


Sumber : Syafudin, 1999

GAMBAR 2.1
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

Penanganan sampah atau teknik operasional sampah merupakan kegiatan terpadu yang mencakup lima elemen pokok, yaitu; penghasil sampah, pengumpulan sampah, transportasi / pengangkutan, proses pengolahan dan

pembuangan akhir (Murdiryanto, 1996). Semua elemen pokok tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, estetika dan sikap masyarakat. Hubungan antar elemen-elemen dari sistem pengelolaan sampah secara umum dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Sumber : Mardianto, 1996

GAMBAR 2.2
HUBUNGAN ELEMEN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.6 Beberapa Aspek yang Berhubungan dengan Sistem Pengelolaan Sampah

Aspek-aspek yang berhubungan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah menurut Sarudji (1983) adalah; struktur organisasi, pembiayaan, pelaksanaan, perlengkapan dan peralatan, ketenagaan, pelaporan,

cara kontrak, administrasi, peraturan-peraturan dan landasan kerja, hubungan masyarakat dan perencanaan.

2.6.1 Struktur Organisasi

Alasan yang mendasarkan pada pengembangan atau penyusunan struktur organisasi, adalah untuk menentukan hubungan hubungan dan tugas serta tanggung jawab individu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dari organisasi.

2.6.2 Pembiayaan

Metode untuk mendapatkan pembiayaan pengelolaan sampah di Amerika Serikat dimasukkan kedalam : pajak kekayaan umum, pajak kekayaan khusus, biaya (ongkos) pelayanan, biaya container, dan sumber lainnya. Sedangkan di Indonesia pada umumnya di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat serta dari retribusi konsumen sampah.

2.6.3 Pelaksanaan

Jumlah masing-masing bagian pelaksanaan bergantung dari besarnya badan pengelolaan sampah. Unsur-unsur yang penting dalam pengelolaan sampah adalah pelaksanaan pembersihan dan pengumpulan, pengangkutan oleh gerobak dan truk sampah, pengolahan sampah, pelaksanaan administrasi, pelayanan kesehatan karyawan dan pelaksanaan pengelolaan gedung.

2.6.4 Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan

Pengelolaan perlengkapan dan dan peralatan yang baik bukan hanya terletak pada cara pemeliharaannya saja, akan tetapi termasuk pula dalam kegiatan-kegiatan, analisis penempatan perlengkapan, pengembangan peralatan khusus dan pada organisasi pengelolaan yang lebih besar adalah menyusun rancangan perlengkapan yang khusus. Pada tahap ini diperlukan tenaga-tenaga yang khusus dan terampil, karena kegiatan-kegiatan di sini bersifat spesifik.

Petugas pengelolaan sampah khususnya petugas lapangan, yaitu petugas pengumpul, pengangkutan dan pembuangan sampah perlu dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan pakaian kerja yang memenuhi syarat. Peralatan pelindung diri yang dimaksud adalah; topi, masker, sarung tangan, sepatu boot, pakaian, jas hujan, dan kaca mata bila diperlukan.

Keberhasilan pelaksanaan dari suatu pengelolaan sampah akan bergantung pula pada tingkatan pendidikan, proses pemilihan, latihan-latihan dan supervisi terhadap personilnya. Dalam proses pemilihan personil, yang perlu diperhatikan adalah moral para pekerja, keadaan upah gaji, jam kerja dan tugas dari pekerjaan.

2.6.5 Pelaporan

Pelaporan ini berorientasi pada hal-hal yang berhubungan dengan penilaian atau evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pengelolaan sampah. Informasi atau pelaporan ini digunakan untuk membantu pengelolaan sampah dalam penerapan alat-alat yang tepat untuk pelaksanaan pengelolaan sampah dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai

atau mengevaluasi secara mendalam terhadap perubahan-perubahan prosedur yang telah dicoba untuk diterapkan.

Disamping itu, pelaporan juga berguna untuk membantu merencanakan pembiayaan, terutama bila terjadi peningkatan pembiayaan baik sebagai akibat dari pengembangan, perubahan prosedur maupun dalam hal kenaikan harga dan sebagainya.

2.6.6 Cara Kontrak

Pengumpulan sampah maupun kegiatan-kegiatan dalam sistem pengelolaan sampah yang lainnya dapat dikerjakan oleh pihak swasta baik dalam bentuk badan usaha maupun dalam bentuk perseorangan. Namun demikian, cara ini perlu didasari dengan perbandingan pembiayaan secara benar. Apakah dengan dikontrakkan akan lebih murah atau lebih mahal. Data-data yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan ini sangat kurang, sehingga perbandingan hanya berdasarkan perkiraan.

2.6.7 Peraturan dan Landasan Kerja

Pada dasarnya peraturan-peraturan landasan kerja berdasarkan elemen fungsional. Karena elemen-elemen fungsional ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga pada tiap-tiap instansi pengelolaan sampah di wilayah atau daerah-daerah kerja tertentu mempunyai peraturan dan landasan kerja sendiri-sendiri yang tidak sama satu dengan lainnya.

Namun demikian, peraturan-peraturan tentang landasan kerja tersebut setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Pertanggungjawaban Administrasi
3. Penyimpanan Sampah Sementara
4. Pengumpulan
5. Pengangkutan
6. Pengolahan
7. Pembuangan
8. Masalah-masalah khusus
9. Pembiayaan
10. Pelanggaran dan sanksi-sanksi yang akan diberikan

2.6.8 Hubungan dengan Masyarakat

Oleh karena para pekerja lapangan sering berhubungan dengan masyarakat secara langsung, maka sangat diperlukan kesadaran dari para petugas untuk memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat konsumen. Bagi para petugas sangat diperlukan adanya kesadaran untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, begitu juga dengan para konsumen sangat diperlukan adanya partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat konsumen perlu mengetahui sistem atau cara kerja dari sistem pengelolaan sampah. Informasi tersebut dapat

BAB III

KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA TANJUNGPINANG

3.1. Gambaran Umum Kota Tanjungpinang

3.1.1. Kondisi Fisik

Kota Tanjungpinang adalah daerah otonomi, yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Otonomi, dengan luas wilayah 239,5 Km² dan 587,6 Km² dari luas lautan.

Secara geografis, Kota Tanjungpinang terletak antara 4°15' Lintang Utara, 0°48' Lintang selatan, 103°10' Bujur Timur hingga 109° Bujur Timur. Adapun secara administrasi, Kota Tanjungpinang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Galang, Bintan Timur dan Teluk Bintan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Selat Riau.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Riau.

Wilayah administrasi Kota Tanjungpinang meliputi empat Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan empat Kelurahan.
- Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan lima Kelurahan.
- Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan empat Kelurahan.

**PENINGKATAN PETUGAS SAMPAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KOTA TANJUNGPINANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**TENGGU DAHLAN
L4D003109**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

- Kecamatan Bukit Bestari dengan lima Kelurahan.

Kota Tanjungpinang yang berbukit-bukit dan lereng, dapat pula ditinjau dari keadaan topografi Kota Tanjungpinang secara umum dicirikan dalam bentuk morfologi yang datar, bergelombang hingga berbukit. Kondisi topografi yang datar hingga bergelombang terdapat dibagian barat kota, sedangkan topografi landai dan datar sebagian besar berada dipesisir pantai dan kawasan pusat kota (Kecamatan Tanjungpinang Barat).

Secara lebih rinci kondisi topografi Kota Tanjungpinang dapat dibagi kedalam tiga kemiringan lereng, yaitu:

- Lereng dengan kemiringan 0 – 2 % memiliki luas 13,307 Ha (55,56 %).
- Lereng dengan kemiringan 3 – 15 % memiliki luas 9,575 Ha (39,98 %).
- Lereng dengan kemiringan 16 – 40 % memiliki luas 1,68 Ha (4,46 %).

Penggunaan lahan di Kota Tanjungpinang didominasi oleh penggunaan lahan yang bersifat tidak terbangun (*non build up area*), seperti hutan yang luasnya mencapai 4,460 Ha (36,06 %) dan perkebunan seluas 4.011,5 Ha (32,43 %). Untuk lahan terbangun lahan yang menonjol berupa perkampungan seluas 2.485,43 Ha (10,38 %) dan perdagangan, dapat dilihat dalam tabel 3.1. sebagai berikut : (Buku Saku Kota Tanjungpinang 2002).

TABEL 3.1
PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NO	JENIS PENGUNAAN	LUAS (Ha)	%
1	Perkampungan	2.485,43	10,38
2	pertokoan	25,17	0,11
3	Pasar	15,49	0,06

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (Ha)	%
4	Kebun Campuran	2.124,28	8,87
5	Perkebunan	7.768,06	32,43
6	Tanah Sudah Diperuntukkan	92,95	0,39
7	Tanah Belum Diperuntukkan	2.755,57	11,51
8	Pelabuhan Udara	46,47	0,19
9	Hutan	8.636,56	36,60
JUMLAH		23.950	100,00

Sumber Data: Buku Saku Kota Tanjungpinang 2004

Konsentrasi permukiman penduduk Kota Tanjungpinang pada saat ini berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kemboja, Kampung Baru, dan Tanjungpinang Barat. Bila dilihat dari luasnya penggunaan lahan berupa perumahan, maka konsentrasi perumahan atau permukiman penduduk berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu seluas 921 Ha (Tahun 1997) sementara di Kecamatan Tanjungpinang Barat 397,8 Ha. (Buku Saku Kota Tanjungpinang 2002).

3.1.2 Keadaan Iklim

Kota Tanjungpinang mempunyai iklim basah, dengan rata-rata temperatur terendah 18° C dan 27° C, tekanan udara rata-rata terendah 1.010,2 mbs dan tertinggi 1.013,7 mbs dengan kelembaban udara rata-rata 61 % sampai dengan 91 % disamping mengalami dua musim utama yaitu :

- Musim Utara berada antara tenggang waktu bulan Desember sampai dengan Februari.
- Musim Timur terjadi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei.
- Musim Selatan dapat dilihat pada bulan juni sampai dengan Agustus, dan

- Musim Barat berhembus pada bulan September sampai dengan Nopember.

Pergantian musim selalu mengakibatkan arah angin tidak menentu sehingga pada saat berhembusnya angin utara dan barat diselingi dengan hujan terus menerus yang diiringi angin kencang, cuaca sulit diramal, mengakibatkan gelombang mencapai puncaknya sehingga ada beberapa kegiatan yang kadang terhenti.

3.1.3 Demografi

Kota Tanjungpinang adalah merupakan Kota lama yang memiliki banyak fungsi, dan terkenal sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sudah terkenal sebagai kota dagang, pariwisata dan sebagai tempat persinggahan yang pada saat ini berkembang menjadi sebuah kota. Penduduk kota Tanjungpinang senantiasa meningkat seiring dengan kemajuan pendapatan perkapita masyarakatnya. Jumlah penduduknya sampai dengan akhir bulan Februari 2004 berjumlah 134.924 jiwa yang berpencar pada 18 Kelurahan dengan penduduk yang sepadat saat ini pada Kelurahan Tanjungpinang Barat, berjumlah 16,495 jiwa dengan KK. Dan yang terjarang berada pada Kelurahan Dompok dengan jumlah penduduk 1.606 jiwa dengan 374 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2
JUMLAH PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG AWAL TAHUN 2004

NO	KELURAHAN	JUMLAH H KK	LUAS WILAYAH (KM ²)	PENDUDUK AKHIR BULAN	PEN DAPATAN
	KEC. TPI KOTA	4.648	52.5	17.980	
1.	<u>Kec. TPI Kota</u>	<u>1.669</u>	<u>1.5</u>	<u>6.330</u>	
2.	Kel. Penyengat	633	4	2.220	

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	LUAS WILAYAH (KM ²)	PENDUDUK AKHIR BULAN	PEN DAPATAN
3.	Kel. Kampung Bugis	1.234	24	5.486	
4.	Kel. Senggarang	1.111	23	3.584	
	KEC. TPI BARAT	10.745	34.5	46.040	
1.	Kel. TPI Barat	3.701	10.5	16.495	
2.	Kel. Kamboja	<u>2.823</u>	<u>8.5</u>	<u>12.621</u>	
3.	Kel. Bukit Cermin	1.603	8.5	7.934	
4.	Kel. Kampung Baru	7.922	7	8.990	
	KEC. BUKIT BESTARI	10.415	52.70	41.908	
1.	Kel. Tpi Timur	<u>1.625</u>	<u>8</u>	<u>7.406</u>	
2.	Kel. Tanjung Unggat	<u>2.820</u>	<u>7</u>	<u>10.879</u>	
3.	Kel. Tg Ayun Sakti	2.498	7	7.238	
4.	Kel. Sungai Jang	<u>3.098</u>	<u>7</u>	<u>14.779</u>	
5.	Kel. Dompok	374	2.7	1.606	
	KEC. TPI TIMUR	8.812	77.5	28.996	
1.	Kel. Melayu Kt Piring	1.926	12	8.153	
2.	Kel. Kampung Bulang	2.157	11.5	6.843	
3.	Kel. Batu IX	1.520	23	6.384	
4.	Kel. Air Raja	1.592	12	4.010	
5.	Kel. Pinang Kencana	1.617	13	3.606	
	PEMKOT TPI	34.620	239.5	134.924	

Sumber Data: Buku Saku Kota Tanjungpinang

Dari jumlah penduduk tersebut, jika dilihat dari kualitas dalam bidang pendidikan maka dapat dilihat secara prosentase, yang terbesar masih didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan SD atau sederajat, padahal pendidikan dapat memberikan peranan utama bagi suatu kota dalam usaha peningkatan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, terampil dan kreatifitas yang tinggi dengan disertai insane yang beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



GAMBAR 3.1
PENGANGKAT TUMPUKAN SAMPAH OLEH PETUGAS KEBERSIHAN
DI JL. RAJA HAJI FISABILILLAH KM. 7 KOTA TANJUNGPINANG



GAMBAR 3.2
SALAH SATU KEGIATAN PENGUMPULAN SAMPAH YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN
DI JL. BRIGJEND. KATAMSO TANJUNGPINANG

TABEL 3. 3
JUMLAH VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT BERDASARKAN
JUMLAH, VOLUME, DAN RIT / HARI JENIS TRUK SAMPAH
DI KOTA TANJUNGPINANG

NO	JENIS TRUK SAMPAH	JUMLAH TRUK (UNIT)	VOLUME TRUK (M ³)	JUMLAH RIT PER HARI	SAMPAH TERANGKUT (M ³ /HARI)
1.	Dump Truk (door to door)	5	± 8 m ³ (3,5 x 2 x 1,1 m)	3	120
2.	Arm Roll Truk (TPS Kontainer)	6	± 6 m ³ (3 x 2 x 1 m)	4	144
Jumlah		11			264

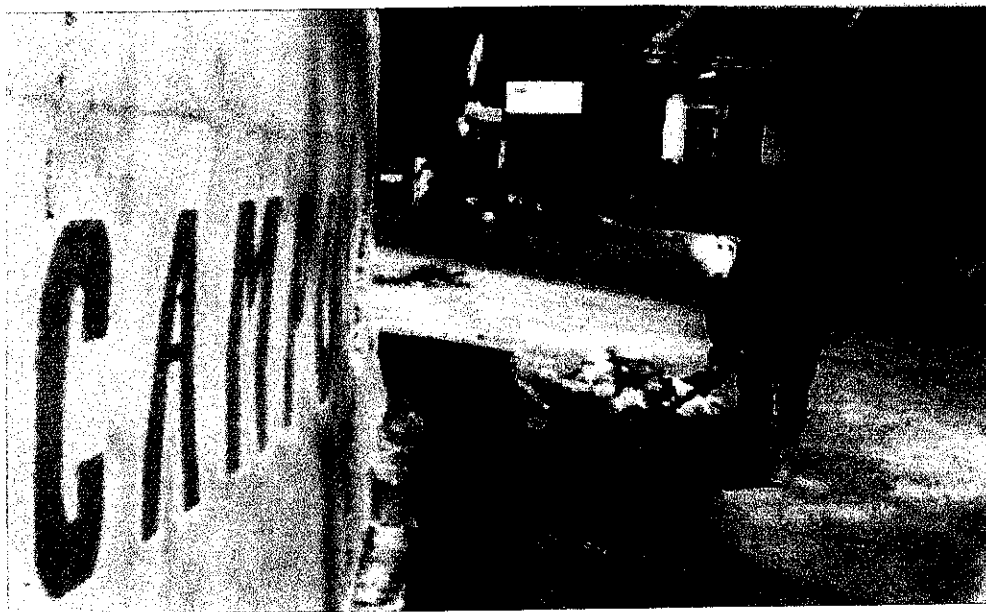
Sumber : Hasil Pengukuran dan Observasi Lapangan Tahun 2003

Sampah yang tidak terangkut di Kota Tanjungpinang, sekitar 42,16 % dari jumlah timbulan 456,39 m³ / hari akan terakumulasi dari hari ke hari. Hal ini timbul dikarenakan masyarakat melakukan pembuangan di lokasi tanah kosong (TPS liar), pembakaran sampah di perkarangan, membuang sampah ke perairan laut / pantai dan membuang sampah ke saluran air drainase selokan.

Berdasarkan pada observasi di lapangan, pada waktu air laut pasang, maka air laut masuk ke permukiman di tepi pantai (pelantar), sehingga sampah yang berasal dari pembuangan di daerah permukiman penduduk (pelantar) mencemari perairan laut, kejadian ini dapat dilihat khususnya di perairan Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, selain itu, pada waktu air laut surut menimbulkan bau yang menyengat disekitar lingkungan permukiman penduduk (pelantar). Pada waktu hujan, menjadi pemandangan yang biasa, di setiap jalan kota mengalami banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran drainase oleh sampah-sampah, juga disekitar muara sungai / selokan dipenuhi oleh timbulan sampah-sampah yang bersumber dari daerah permukiman yang dilalui oleh sungai / selokan.



GAMBAR 3.3
PENUMPUKAN SAMPAH DI LOKASI TEPI LAUT JL. H. AGUS SALIM
KOTA TANJUNGPINANG



GAMBAR 3.4
SALAH SATU KEGIATAN PENGUMPULAN SAMPAH YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN DI JL. A. KAHAR YUSUF
TANJUNGPINANG

3.2 Kebijakan Persampahan Kota Tanjungpinang

Sebagai pusatnya pembangunan dan sesaknya kegiatan perekonomian perdagangan dalam proses perkembangan dan pembangunan kota, sangat berpotensi terhadap luapan sampah yang semakin hari semakin bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat dirasakan adanya penumpukan sampah pada tempat-tempat tertentu disamping pembuangan sampah yang tidak semestinya yaitu pembuangan sampah yang dilakukan terhadap warga masyarakat.

Masyarakat Kota Tanjungpinang yang mendiami daerah-daerah pelantar/bertempat tinggal dipinggir pantai dan daerah permukiman penduduk yang kurang rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga dan memelihara kebersihan, hal ini sangat membutuhkan suatu pemikiran secara seksama baik pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama warga masyarakat agar terpeliharanya kebersihan lingkungan, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama warga masyarakat agar terpeliharanya kebersihan lingkungan, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menerapkan kebijaksanaannya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempertegas dan meningkatkan jam pembuangan sampah sesuai dengan Surat Edaran Walikota Tanjungpinang tentang waktu pembuangan sampah yang disejalankan dengan truk pengangkut sampah yaitu untuk pagi hari jam

05.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB, dan siang / sore hari jam 12.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

2. Mensosialisasikan kembali pemberian sanksi / penindakan tegas kepada para pemilik tempat usaha dan warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 1989 tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan).
3. Meningkatkan kemampuan, kemauan dan kualitas disiplin kerja para petugas kebersihan Kota Tanjungpinang agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh pimpinan.

Di Kota Tanjungpinang Jumlah produksi timbulan sampah per hari berdasarkan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 152.013 jiwa x 3 liter / jiwa / hari adalah sekitar 456,39 m³ / hari. Jumlah produksi sampah sekitar 456,039 m³ / hari tidak seluruhnya terangkut, berdasarkan pengukuran dan observasi lapangan, sampah yang terangkut itu diperoleh dari jumlah truk x volume truk x jumlah rit per hari, adalah sekitar \pm 264 m³ / hari atau baru sekitar 57,84 % sampah terangkut di Kota Tanjungpinang.

3.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sampah

Fasilitas dan sarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang adalah tong / bin sampah, gerobak sampah, bak sampah, TPS *Container*, Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 6 yang terdiri dari *dump truck* dan *armroll*, *bulldozer* dan areal TPA (lihat tabel 3.4).

TABEL 3.4
FASILITAS DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
TANJUNGPINANG

NO	JENIS FASILITAS & SARANA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	<u>Tahap Penanmpungan</u>			
	• Bin / Tong	Buah	257	Pengadaan tahun 2001
	• TPS Container	Buah	25	Pengadaan tahun 1999
2.	• Bak pemasangan batu bata	Buah	7	Pengadaan tahun 2001
	<u>Tahap Pengangkutan :</u>			
	• Dump Truck vol. 8 m ³	Unit	5	Pelimpahan dari
	• Arm roll Truk vol 8 m ³	Unit	6	Kotip/Pemkab
	• Gerobak Vol 0.8 m ³	Unit	110	Pemkab
	• Gerobak Dorong 0.3 m ³	Unit	50	Pengadaan tahun 2002
3.	<u>Tahap Pembuangan Akhir:</u>			
	• Luas Areal TPA	Hektar	5,5	Pengadaan tahun 2001
	• Bulldozer	Unit	1	Lokasi 15 Km Pengadaan tahun 2001
4.	<u>Sarana Penunjang Operasional:</u>			
	• Skop	Buah	75	
	• Cangkul Garpu	Buah	125	
	• Cangkul	Buah	125	Pengadaan sarana
	• Sapu Lidi	Buah	80	penunjang tahun 2002
	• Sorok Sampah	Buah	125	
	• Pungkis / Loa	Buah	75	
5.	<u>Alat Pelindung diri / petugas:</u>			
	• Topi	Buah	350	Pengadaan Sarana APBD
	• Pakaian tangan panjang	Potong	360	tahun 2002
	• Sepatu boot	Pasang	350	
	• Jas hujan	Potong	200	
	• Sarung tangan	Pasang	75	
6.	<u>Fasilitas lain:</u>			
	• Bangunan kantor	Buah	1	Pelimpahan dari Kotip
	• Kendaraan Mini bus	Unit	1	Tanjungpinang
	• Kendaraan pick up	Unit	1	Kepulauan Riau Tahun
	• Kendaraan roda dua	Unit	1	2001

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Tanjungpinang Tahun 2004



GAMBAR 3.5
KONDISI TRUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI JL. HANG TUAH
KOTA TANJUNGPINANG



GAMBAR 3.6
SALAH SATU TPS CONTAINER YANG DI GUNAKAN SEBAGAI
TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI JL. H. AGUS SALIM KOTA
TANJUNGPINANG

3.4 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah proses pemindahan sampah dari satu tempat ketempat yang lain. Alat atau sarana pengangkutan sampah bermacam-macam, tergantung pada besarnya muatan, kelas / jenis sampah, jarak angkut, topografi, pola pengangkutan sampah, ketersediaan dana, ketersediaan tenaga kerja dan prasarana jalan.

Alat angkut yang pada saat ini sering digunakan untuk mengangkut sampah adalah gerobak sampah, *fixed truck*, *dump truck* dan *arm roll truck*. Penggunaan jenis alat angkutan tersebut tentu saja mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing.

3.5 Tempat Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir adalah elemen terakhir dalam hal penanganan masalah sampah. Di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) sampah kemudian dikelola sebaik mungkin agar tidak mencemari lingkungan disekitarnya. Beberapa teknik pembuangan akhir sampah yang banyak dilakukan di daerah antara lain; *open dumping*, *sanitary landfill*, insenerasi dan pengomposan.

Open dumping merupakan sistem pengelolaan sistem pengolahan sampah di TPA dengan cara menimbun sampah pada areal tertentu, kemudian diratakan. Sistem ini sering menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air maupun tanah. Dengan sistem ini dibutuhkan lahan yang cukup luas, biaya operasionalnya relatif lebih murah.

Pengelolaan sampah (*Sanitary landfill*) di TPA dengan cara penimbunan sampah dengan kaidah-kaidah sanitasi. Sampah yang ditimbun dan diratakan kemudian diuruk dengan tanah lapis demi lapis. Sistem ini tidak menimbulkan bau, tidak menjadi sarang penyakit. Biaya operasional sistem ini lebih mahal karena dibutuhkan tanah atau lahan yang luas untuk pengurukan.

Pengelolaan sampah di TPA dengan cara pembakaran pada suhu tinggi (*insenerasi*). Dengan sistem ini tidak dibutuhkan lahan yang luas, abu sisa pembakaran tidak menimbulkan pencemaran, tetapi dibutuhkan dana investasi yang besar.

Pengomposan sampah organik menjadi pupuk kompos dengan bantuan mikroba. Pengolahan sampah organik menjadi kompos tidak menimbulkan pencemaran. Lahan untuk TPA tidak harus luas, akan dapat menambah pendapatan masyarakat pengelola sampah.

Tahap-tahap pengolahan sampah di TPA secara garis besar meliputi :

1. Pemilihan / seleksi sampah yang tidak bisa hancur.
2. Peralatan dan pemadatan sampah, yaitu sampah akan mengalami penyusutan volume setelah dilakukan perataan dan pemadatan ± 60 %. Lapisan sampah maksimum 3 lapisan dengan tinggi maksimum pada tiap lapis $\pm 5 \times 20$ m. Perataan dan pemadatan sampah dilakukan setiap hari dengan *bulldozer/truckdozer*. Fungsi pemadatan adalah:
 - a. Mengurangi dan mengoptimisasikan kebutuhan lahan.
 - b. Mengurangi penghamburan sampah yang belum ditutup lapisan tanah oleh angin seminimal mungkin.

- c. Proses pembusukan sampah relatif akan lebih cepat.
 - d. Mengurangi proses methanisasi (keluarnya gas methan).
3. Proses pengisian sampah dan pelapisan / penutupan tanah. Dalam proses ini penutupan lapisan tanah akhir setelah lapisan sampah mencapai tinggi yang dikehendaki \pm 1 m dan tebal lapisan tanah \pm 20 cm.

3.6 Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang

Sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang dilihat pada berbagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung satu dengan lainnya, sehingga masing masing komponen tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota yang bersih, sehat dan teratur. Komponen-komponen tersebut adalah sub sistem organisasi dan manajemen, seperti; sub sistem institusi/dinas terkait dengan masalah lingkungan hidup (Dinas Kebersihan, Bapedalda, Kesehatan dan lainnya), sub sistem teknik operasional kebersihan lingkungan kota (Dinas Kebersihan), sub sistem pembiayaan (Pemerintah Kota), sub sistem hukum dan peraturan (Bapedalda Kota) dan sub sistem peran serta masyarakat.

3.7 Dinas Kebersihan Kota Tanjungpinang

Perkantoran adalah suatu bangunan yang menjadi tempat atau domisili suatu organisasi, tempat melaksanakan kegiatan administratif dan lambang keberadaan organisasi (H.A.S. Moenir, 2002: 48). Perkantoran mempunyai arti yang lebih terarah kepada peranan yang dilakukan oleh organisasi di dalam

bangunan kantor itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pelayanan kegiatan administrasi secara luas, yaitu penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perkantoran mempunyai tiga fungsi utama yang satu sama lainnya berjalan dalam satu sistem, adapun tiga fungsi utama perkantoran tersebut ialah; sebagai pusat pemikiran, sebagai pusat administrasi (pelayanan) dan sebagai pusat data dan informasi (Moenir, 2002 : 48).

Dinas Kebersihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan di bidang Kebersihan Kota yang berorientasi pada pelayanan publik. Disamping bersifat sosial, juga mengharuskan Kepala Dinas untuk melakukan penataan organisasi kerjanya guna menjamin kelancaran dan kelangsungan usaha sesuai dengan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis dan pelayanan di bidang perhubungan.

Tanpa struktur organisasi yang kuat maka akan dapat mengakibatkan instabilitas dalam menjalankan berbagai program yang direncanakan. Sejalan dengan semakin berkembangnya mobilitas program kerja yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dalam struktur organisasi, maka semakin meluas pula tugas dan tanggung jawab serta fungsinya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjalankan misi tugas dan fungsi dalam melayani serta menertibkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di bidang kebersihan lingkungan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memiliki pegawai yang merupakan sebagai motor penggerak organisasi sebanyak 57 orang. Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan. Khususnya Sub Dinas Kebersihan yang ditangani oleh seksi Pengolahan Kebersihan dan Pertamanan yang baru didirikan pada tahun 2001, dimana keterbatasan para pegawai masih merupakan kendala (lihat tabel 3.5). seperti halnya pegawai yang menjalankan program Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih dirangkap oleh Sub Dinas Pertamanan.

TABEL 3.5
DATA KEPEGAWAIAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA TANJUNGPINANG

NO	JABATAN	PANGKAT / GOL	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Dinas	Penata Tk.I (III/d)	SI (IIP)	1
2	Kepala Tata Usaha	Penata III / c	SI	
3	Kasubdin Pertamanan	Penata III / b	SLTA	1
4	Kasubdin Kebersihan	Penata III / b	Sarjana Muda Kesehatan	1
5	Kasubag Keuangan dan perlengkapan	Penata Muda III / a	SI	1
6	Staf	Penata Muda	SI	1
7	Staf	Pengatur Muda Tk. 1 (II / b)	SMA	2
8	Staf	Pengatur Muda Tk. I	STM	1
9	Staf	Pengatur Muda (II / a)	SMP	1
10	Staf	Juru (I / c)	SD	1

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2003.

Sedangkan untuk petugas operasional sampah dilapangan yang merupakan sebagai tenaga lepas, terlihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

TABEL 3.6
DISTRIBUSI PETUGAS OPERASIONAL PENGELOLA SAMPAH DI
KOTA TANJUNGPINANG

NO	JABATAN PETUGAS	JUMLAH PETUGAS	STATUS PEKERJAAN
1	Pegawai Lapangan	11	Tenaga Lepas
2	Petugas TPA	10	Tenaga Lepas
3	Operator Loader (TPA)	3	Tenaga Lepas
4	Sopir Truk	24	Tenaga Lepas

NO	JABATAN PETUGAS	JUMLAH PETUGAS	STATUS PEKERJAAN
5	Crew / Anggota Truk	40	Tenaga Lepas
6	Penyapu di TPS	25	Tenaga Lepas
7	Penyapu Jalan	69	Tenaga Lepas
8	Penyapu Taman	15	Tenaga Lepas
	Jumlah	197	

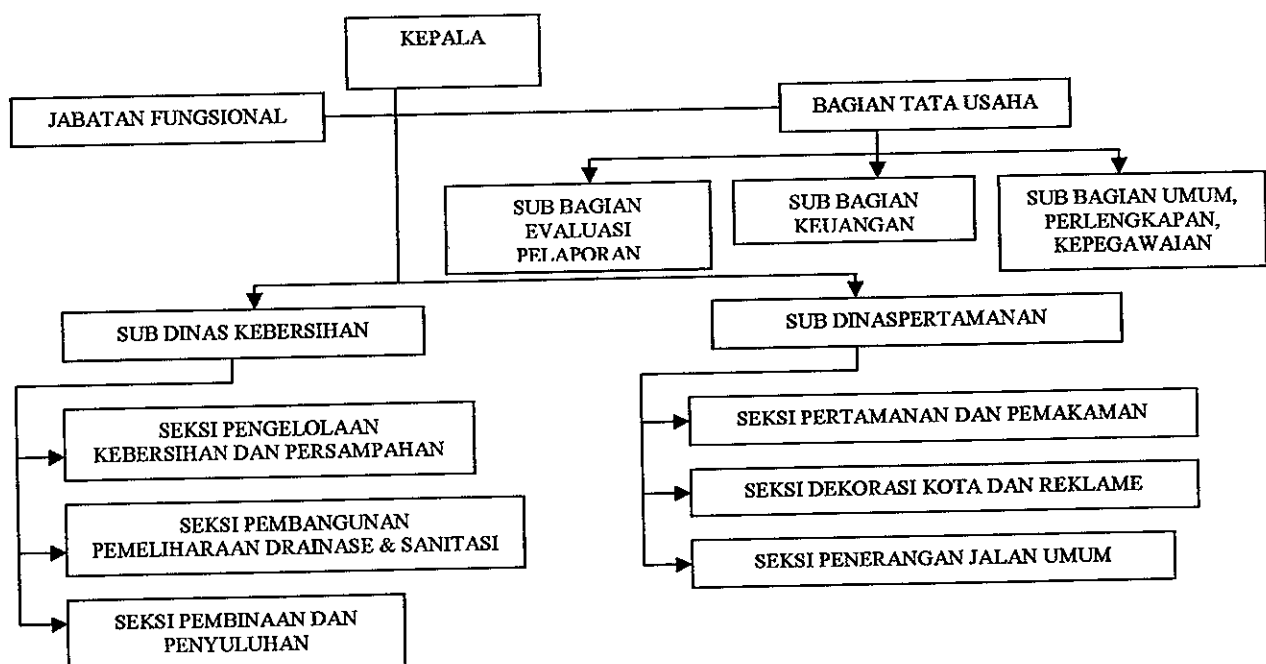
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

TABEL 3.7
DISTRIBUSI TINGKAT PENDIDIKAN PETUGAS PENGELOLA
SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003

NO	JABATAN PETUGAS	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH TENAGA
		Tdk SD	SD	SLTP	SLTA	D III	
1	Pengawas Lapangan	-	-	1	9	1	11
2	Petugas TPA	-	4	2	4	-	10
3	Operator Loader (TPA)	-	-	-	2	1	3
4	Sopir Truk / Roda 4	-	1	4	18	1	24
5	Crew / Anggota Truk	15	13	10	2	-	40
6	Penyapu di TPS	5	5	14	1	-	25
7	Penyapu Jalan	32	22	15	-	-	69
8	Penyapu Taman	-	4	2	9	-	15
	Jumlah	52	49	48	45	3	197

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2003

3.7.1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tanjungpinang



Keterangan:**Kepala Dinas, bertugas :**

- Membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang di Bidang Kebersihan Lingkungan.
- Pelaksanaan teknis, pembinaan dan perizinan.
- Pengelolaan Kepegawaian, kenangan dan perlengkapan dalam perawatan material.
- Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta menganalisa dan evaluasi segala kegiatan, kejadian yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.

Sub Bagian Tata Usaha, bertugas :

- Melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian.
- Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan serta penyusunan naskah dan peraturan pelaksanaan keputusan-keputusan, instruksi-instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan.

Kelompok Jabatan Fungsional, bertugas :

- Melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebersihan dan Petamanan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing.

Sesuai dengan perkembangan dalam bidang perekonomian dan tata pemerintahan di Indonesia yang menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah, maka hak dan kewajiban Pemerintah Daerah antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kuantitas dan kualitas dari pelayanan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Daerah di dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayan. Untuk memenuhi pembiayaan dalam rangka memberikan pelayan kepada masyarakat, maka Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagai lembaga teknis yang sifatnya memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, maka dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar siap dalam mengantisipasi perkembangan era globalisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam rangka otonomi daerah sehingga harus terus berusaha untuk menggali sumber daya manusia, baik yang bersifat intensifikasi, maupun yang bersifat ekstensifikasi.

3.7.2 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja di kebersihan dan pertamanan, sehingga dapat memperlancar laju pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memiliki visi dan misi yang harus tetap dijalankan.

3.7.2.1 Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

- Menjadikan kota Tanjungpinang sebagai kota yang bersih, tertib dan bersinar.
- Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan yang memadai dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kebersihan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
- Memperlancar urat nadi kehidupan masyarakat dalam rangka mobilisasi barang, orang dan jasa berupaya secara berkesinambungan.
- Mengembangkan pelayanan kebersihan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan membangun sektor lain tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta memperhatikan kemampuan sumber daya dan potensi daerah.

3.7.2.2 Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

- Menggali dan berusaha meningkatkan Sumber Daya Manusia guna mencapai sasaran dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelayanan prima.
- Berupaya menyediakan fasilitas kebersihan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat secara merata dan terjangkau.
- Meningkatkan peran petugas dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan yang tertib, aman, nyaman, cepat, tepat dan lancar.
- Memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kebersihan yang baik.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang merata dan terjangkau.

Dalam setiap fungsi baku tersebut, terdapat faktor-faktor yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Ada dua faktor yang terlibat dalam pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut yakni faktor internal yang berada dalam penguasaan organisasi, dan faktor eksternal yang berada di luar penguasaan organisasi.

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang ada 8 orang dan struktur jabatan baru terisi 3 jabatan, yaitu Kepala Dinas, Kepala Subdinas Pertamanan dan Kebersihan dan Kepala Sub bagian Keuangan dan perlengkapan. Sedangkan jabatan Kepala Sub Dinas Kebersihan masih dirangkap oleh Kepala Sub dinas Pertamanan.



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

**PENINGKATAN PETUGAS SAMPAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KOTA
TANJUNGPINANG**

**PETA LOKASI TPS DAN TPA
KOTA TANJUNGPINANG**

Keterangan:

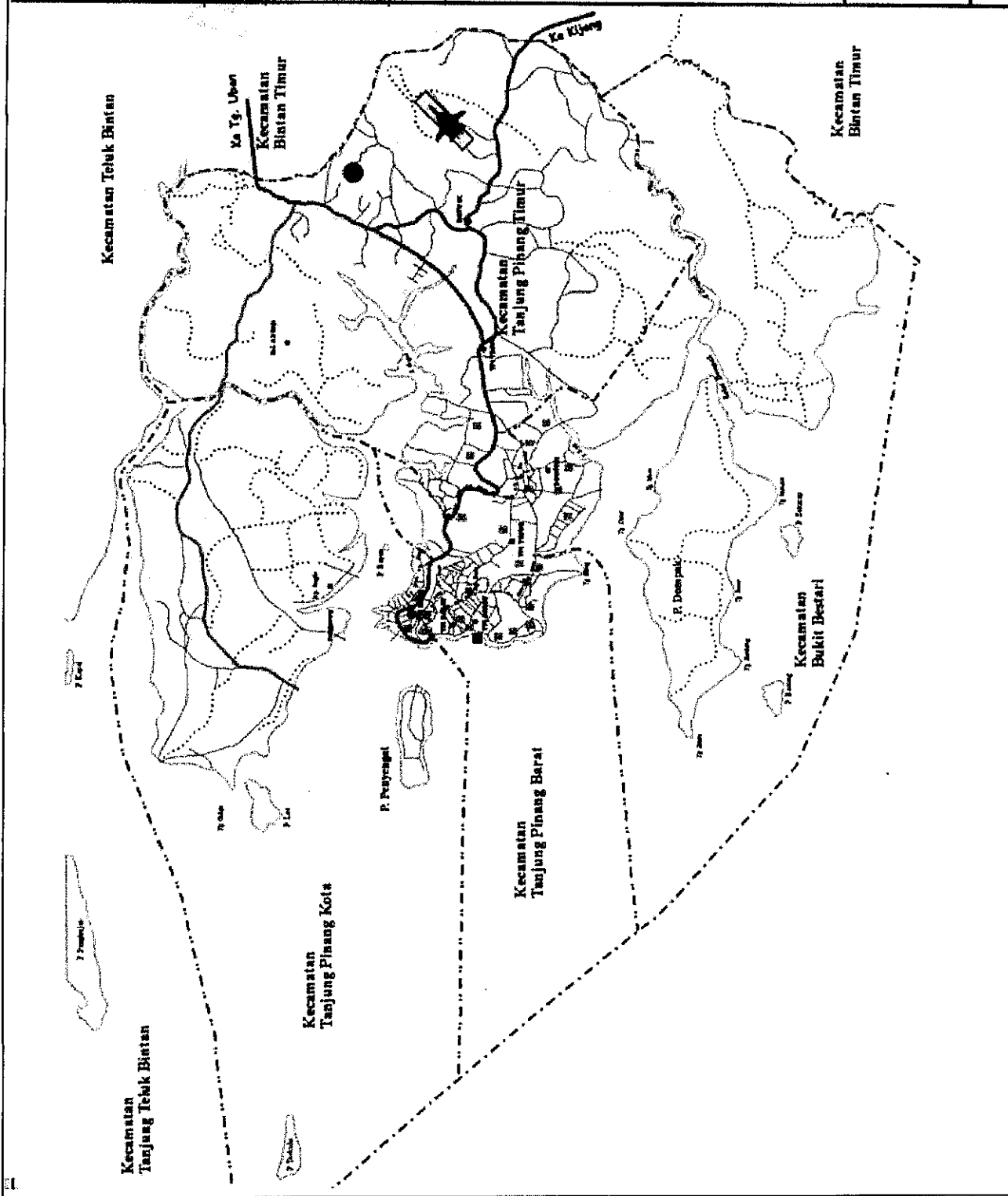
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Batu
- Jalan Tanah
- Sungai
- Waduk
- TPS
- TPA



Skala
1:12.000

SUMBER

RAPPEDA KOTA TANJUNGPINANG



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG

4.1 Analisis Terhadap Timbulnya Penimbunan Sampah Di Kota Tanjungpinang

Awal timbulnya penumpukan sampah di sekitar permukiman masyarakat Kota Tanjungpinang, dikarenakan oleh adanya pemakaian bahan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan ditambah pula dengan perkembangan permukiman penduduk yang tidak merata yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kaum migran dan urbanis yang memerlukan tempat tinggal untuk mencukupi kebutuhan akan tempat tinggal. Oleh karena hal ini berlangsung secara terus menerus, lama kelamaan semakin bertambah, dan pada akhirnya menjadi permukiman yang padat dan berakibat menjadi kumuh dan liar. Hal itu, tentunya tidak terlepas dari berkembangnya perkampungan kumuh di Kecamatan : Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, wilayah Kota Tanjungpinang.

4.1.1 Pertumbuhan dan Pola Perkembangan Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada saat ini selain merupakan sebagai Ibu Kota Propinsi Kepulauan Riau, juga dikenal sebagai kota wisata, perniagaan dan juga merupakan sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang. Disamping itu, Kota Tanjungpinang juga tidak terlepas dari adanya permukiman kumuh dan liar, yang tentunya muncul diakibatkan oleh lajunya perkembangan kota. Adapun lokasi

permukiman kumuh yang menjadi tempat penimbunan sampah tersebut adalah wilayah; Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Tanjung Unggat.

Dengan semakin besarnya jumlah penduduk perkotaan, maka dapat menimbulkan masalah kelangkaan lahan, karena antara kebutuhan lahan kota dengan ketersediaan lahan yang digunakan untuk perkembangan kota tidak seimbang.

Pada lingkaran terdalam kedua itulah terletak kampung kota. Kemudian semakin bertambahnya penduduk baik karena disebabkan oleh keberadaan para migrant dan urbanis, sejalan dengan laju perkembangan kota, sehingga perkampungan dan daerah terbangun lainnya akan berkembang secara terus menerus secara kurang teratur dan terawasi. Pada akhirnya permukiman yang muncul adalah perkampungan yang padat, kumuh, liar, tidak tertib, dan tidak teratur.

Pertumbuhan Kota Tanjungpinang diawali dari aglomerasi 3 (tiga) distrik: (lihat lampiran perkembangan Kota Tanjungpinang dari masa ke masa):

- Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Senggarang.
- Kota Lama / *Old City*.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Kota Tanjungpinang, dapat di lihat dalam lampiran gambar peta, sebagai berikut :

Selama puluhan tahun distrik-distrik tersebut berfungsi dan berperan sebagai permukiman terpadat dan sebagai pusat kawasan bisnis terbesar di Kota Tanjungpinang. Peran tersebut semakin besar setelah pemerintah membangun dermaga pelabuhan Kota Tanjungpinang. Selanjutnya perkembangan permukiman di Kota Tanjungpinang berkembang cepat kearah Timur atau Km 10, sejak tahun 1970-an pengembangan permukiman mulai menyebar ke berbagai arah mengikuti koridor regional; Timur ke arah Km 9 - 10, dan Senggarang. Barat ke arah Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Berbagai perencanaan pada saat ini sedang dipersiapkan untuk merealisasikan Kota Tanjungpinang menjadi sebuah Ibu Kota Propinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan perkembangan permukiman Kota Tanjungpinang tersebut, maka dapat dikelompokkan bahwa:

- Pada lingkaran pertama terdapat pusat pemerintahan, yang berupa perkantoran dan pusat bisnis yang memanjang di sepanjang jalan Merdeka ,jalan pos, jalan temiang, jalan tengku umar, jalan hang tuah , jalan mesjid raya, jalan bintang, yang dilayani angkutan sampahnya melalui penyapuan dan pengangkut sampah langsung diambil petugas depan tempat pinggiran pertokoan. Sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Lingkaran Kedua adalah pusat perdagangan yang berpusat di Km 9 dan 10 yang dihuni oleh pendatang serta dikelilingi oleh perumahan rakyat.
- Pada lingkaran ketiga merupakan lokasi yang akan dijadikan sebagai bakal pusat kota baru di Tanjungpinang yaitu wilayah Senggarang yang saat ini baru tahap awal pelayanan.

- Pada lingkaran keempat adalah merupakan lokasi perkampungan rakyat yaitu :
tanjung unggat, Dompok, Kampung Bugis, Kota Piring, Sungai jang, dilayani disamping penyapuan TPS-TPS terdekat, pemungutan langsung perumahan tentara yang dipinggir jalan umum.

4.1.2 Timbulnya Penimbunan Sampah Di Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2004 Pemerintah Kota melakukan survey penelitian tentang kondisi permukiman di Kota Tanjungpinang, dimana dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa terdapat permukiman yang menyebabkan terjadinya penimbunan sampah rumah tangga yang tersebar di kota Tanjungpinang, di permukiman-permukiman padat, di tempat-tempat keramaian, karena kenyataan di lapangan bahwa pola tempat tinggal penduduk selalu memanfaatkan tempat tinggal yang berupa perumahan ataupun tempat tinggal yang berbentuk rumah toko, rumah kantor dan toko serta rumah-rumah sewa, baik difungsikan sebagai tempat tinggal permanen ataupun sementara sebagai penghasil sampah.

Oleh karena itu penempatan lokasi-lokasi TPS menjadi prioritas pertama dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
LOKASI PENEMPATAN TPS CONTAINER DI KOTA
TANJUNGPINANG

NO.	LOKASI PENEMPATAN TPS / CONTAINER	JUMLAH CONTAINER	VOLUME (M ³)
1	Kel. Tanjungpinang Timur. (Jl. Brig. Katamso, Ir. Juanda, Kartika) Kel. Tanjung Unggat. (Jl. St. Mahmud)	3 Titik	18
2	Kel. Tanjung Ayun Sakti	1 Titik	6
3	(Jl. Pramuka, R. Ali haji) Kel. Kampung Baru	3 Titik	18

NO.	LOKASI PENEMPATAN TPS / CONTAINER	JUMLAH CONTAINER	VOLUME (M ³)
4	(Jl. Dr. Sutomo, Wiratno) Kel. Tanjungpinang Kota	4 Titik	18
5	(Jl. Diponegoro) Kel. Kampung Bulang	4 Titik	18
6	(Jl. Sukarno Hatta) Kel. Kamboja	1 titik	6
7	(Jl. Kamboja) Kel. Sei Jang	2 Titik	12
8	(Jl. SukarnoHatta, A.Rahman Hakim) Kel. Tanjungpinang Barat	2 Titik	12
9	(Jl. Sulaiman Abd, H. Agus Salim)	4 Titik	24
	Jumlah	24	150

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2004

Kondisi sampah di Kota Tanjungpinang tersebut dilihat dari standar untuk suatu kebersihan lingkungan di wilayah kota, dapat dikatakan sudah mulai memenuhi standar sebagai lingkungan yang bersih bagi suatu wilayah perkotaan yang layak bagi tempat hunian masyarakat, walaupun masih terdapat timbunan-timbunan kecil dari sampah rumah tangga pada tempat-tempat tertentu. Karena kondisi yang masih terlihat agak kotor, kumuh dan tidak sehat tersebut, sehingga dikatakan kurang bersih. Disamping itu, jelas merusak pemandangan dan keindahan kota.

Sumber timbunan sampah di Kota Tanjungpinang, berasal dari lokasi permukiman penduduk, pasar, pertokoan/tempat komersil, hotel, wisma, penginapan, rumah makan/restaurant, sampah jalanan dan taman, sampah saluran pembuangan di tepi jalan, sampah perkantoran/istansi, fasilitas umum, dan industri. Sedangkan yang merupakan sumber timbulan sampah terbesar adalah berasal dari permukiman penduduk, yaitu 75,8% (lihat tabel. 4.2).

TABEL 4.2
SUMBER TIMBUNAN SAMPAH DAN JUMLAH PRODUKSI SAMPAH
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	SUMBER TIMBUNAN SAMPAH	JUMLAH PRODUKSI TIMBUNAN	
		m ³ / HARI	%
1	Permukiman Penduduk	345,68	75,8
2	Pasar dan Pertokoan	12,31	2,7
3	Hotel, Wisma, Penginapan, Restaurant	30,10	6,6
4	Sampah Jalan	36,94	8,1
5	Perkantoran / Institusi dan Fasilitas Umum	16,87	3,7
6	Kawasan Industri	14,49	3,1
JUMLAH		456,39	100

Pada tabel 4.3 tentang Karakteristik pengumpul Sampah terlihat gambarnya sebagai berikut :

TABEL 4.3
KARAKTERISTIK PENGUMPUL SAMPAH

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		SIFAT PENDIDIKAN				PENGAWASAN			
		ORANG	%	TETAP	%	SAMPINGAN	%	PERLU	%	TIDAK	%
1	Tidak Tamat SD	52	27	21	41	31	59	11	22	41	78
2	SD / Sederajat	49	25	17	35	32	65	20	40	29	60
3	SLTP / Sederajat	48	24	11	23	37	77	18	37	30	63
4	SLTA / Sederajat	45	23	13	28	32	72	10	20	35	78
5	Diploma	3	1	1	33	2	66	-	-	3	100
		197	100	63		134		59		138	
				-32%		-100%		-10%		-70%	

Sumber : Data Olahan Quesioner.

Dari data questioner terlihat jumlah petugas kebersihan didominasi oleh petugas yang berpendidikan SLTA ke bawah berjumlah 194 orang atau 99 % dari jumlah keseluruhannya. Hal ini menggambarkan bahwa para petugas kebersihan secara umum tidak memerlukan orang yang berpendidikan akan tetapi orang yang ingin dan mau serta mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh lembaga dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui pengaturan yang terinci oleh pengawas lapangan.

Namun demikian walaupun pendidikannya rata-rata tidak tinggi akan tetapi pekerjaan kebersihan itu merupakan pekerjaan sampingan bukan merupakan pekerjaan pokok, hal ini terlihat dari jawabannya rata-rata menjawab diatas 59 % dari setiap tingkat pendidikan , apalagi jika dilihat dari keseluruhannya mencapai 68 % yang merupakan pekerjaan sampingan.

Dapat dimaklumi kalau suatu pekerjaan itu tidak menjadi pekerjaan pokok, sehingga yang bersangkutan terburu oleh waktu, merasa pekerjaan dikerjakan asal ada kegiatan oleh pengawas. Hal ini juga tergambar dari semua petugas yang tidak mau pekerjaannya diawasi menjawab diatas 60% dari berbagai tingkat pendidikan atau serta keseluruhannya mencapai 70 % rata-rata tidak perlu ada pengawasan.

Sehingga didapat kesimpulan sementara, bahwa petugas kebersihan dan pertamanan kota Tanjungpinang ini berpendidikan rendah, mempunyai pekerjaan sampingan serta bekerja semaunya tanpa ada pengawasan, hal ini akan menyebabkan sulit menyampaikan pesan dan petunjuk tentang tata cara pekerjaan yang sesungguhnya, karena pendidikan yang rendah dan penambahan beban kerja yang selalu dibayangi oleh pekerjaan tambahan serta merasa malu, khawatir apabila ada pekerjaannya di awasi. Pekerjaan tanpa diawasi membuat pemikiran para petugas bekerja terpengaruh oleh kondisi-kondisi sekitarnya, yang kadang kala membuat kegiatan rutin petugas terabaikan.

TABEL 4.4
KARAKTERISTIK DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEMUKA
MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	PEKERJAAN		PENGHASILAN		
			PNS	SWASTA	500	500-1 jt	Lebih 1 jt
1.	SLTP	-	-	-	-	-	-

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	PEKERJAAN		PENGHASILAN		
			PNS	SWASTA	500	500-1 jt	Lebih 1 jt
2.	SLTA	9 orang	3	6	3	4	2
3.	DIPLOMA	5 orang	4	1	-	4	1
4.	SAJANA	16 orang	11	5	-	-	16

Sumber : hasil survei tahun 2005

Dari hasil Quisioner tersebut , menggambarkan bahwa tokoh masyarakat memiliki pendidikan diatas Sekolah lanjutan Atas (SLTA), bahkan ada yang berpendidikan sarjana, menempati urutan pertama dan mempunyai penghasilan rata-rata diatas UMR yang ada di Kota Tanjungpinang .

Dengan demikian jawaban yang diperoleh sangat membantu dalam upaya – upaya Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan kedepan terutama menyangkut kebersihan lingkungan.

Mengenai Persepsi Tokoh Masyarakat tentang kegiatan pengumpulan sampah di Kota Tanjungpinang dapat di lihat tabel 4.5 berikut :

TABEL 4.5
PERSEPSI PEMUKA MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN
PENGUMPUL SAMPAH

NO.	JENIS KEGIATAN & PRASARANA	ADA PENINGKATAN	BELUM PENINGKATAN	JUMLAH
1.	Pengumpulan sampah	Sesuai dengan jadwal yang ditentukan	-	27 (90%)
2.	Armada Kebersihan Kota	-	masih kurang alat dan petugas pengumpul sampah	20 (66,6%)
3.	Penyuluhan tentang Kebersihan	-	masih jarang dilaksanakan penyuluhan	24 (80%)

NO.	JENIS KEGIATAN & PRASARANA	ADA PENINGKATAN	BELUM PENINGKATAN	JUMLAH
4.	Pelayanan sampah dilingkungan sekitar	berjalan dengan baik	-	17 (56,6%)
5.	Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan sampah	-	Kesadaran masyarakat masih kurang dalam membayar iuran sampah sehingga pekerja bekerja tidak maksimal	19 (63,3%)

Sumber : Hasil survei tahun 2005

Dari quisioner di dapat kesimpulan awal, bahwa memang untuk mendapat kebersihan sesuai dengan yang diinginkan memerlukan petugas. Mentaati jadwal, sebagaimana terlihat 27 orang dari 30 orang pemuka masyarakat menginginkan hal tersebut, keaslian pelayanan sampah disekitar harus terlaksana dengan baik terlihat dari jumlah tokoh masyarakat yang menjawab 17 orang atau 56,6 % dari jumlah 30 orang tokoh masyarakat.

Untuk kegiatan penyuluhan kebersihan , armada dan partisipasi masyarakat secara nyata masih belum menunjukkan penyesuaian dengan kegiatan, volume kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang sesungguhnya.

TABEL 4.6
PERSEPSI DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG

NO	MASYARAKAT TANJUNGPINANG	PEMAHAMAN TENTANG SAMPAH	
		BAIK	KURANG BAIK
1	Tokoh Masyarakat 25 orang	86,7 %	13,3 %
2	Pegawai Dinas Kebersihan 15 orang	100 %	-
3	Petugas Kebersihan 150 orang	60 %	40 %

Sumber: Data olahan Questioner tahun 2004

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ternyata pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang tentang sampah sampah pada umumnya sudah cukup baik berkisar antara 60 – 86 persen. Namun dalam realitanya dilapangan masih banyak terlihat penimbunan sampah liar yang terdapat disekitar pekarangan tempat tinggal mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan mengapa sampai terjadi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu yang bersangkutan. Karena hal ini menyangkut kesadaran seseorang tersebut tentang pentingnya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya Pemerintah Kota Tanjungpinang telah merealisasikan beberapa program yang berkaitan dengan masalah kebersihan, yang diantaranya adalah kegiatan Jum'at bersih yang dilakukan pada setiap hari jum'at. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat mulai dari lingkungan Pemerintah Kota, Lingkungan lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitarnya diwajibkan untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

4.2 Kondisi Empiris Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5, 6 dan 19 secara jelas menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya (Pasal 5 ayat (2)).

2. Setiap Orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (1));
3. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan Hidup (Pasal 19).

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ialah mengikutsertakan masyarakat semaksimal mungkin atau sering disebutkan sebagai peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang dan Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, maka tujuan dasar dari partisipasi masyarakat adalah:

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara;
3. Membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang lebih baik dan cepat.

Tiga hal tersebut merupakan tujuan dasar yang kemudian dipecah menjadi tujuan dan kegunaan yang lebih terperinci lagi.

4.2.1 Sumber Kerusakan Lingkungan

Setiap orang mempengaruhi lingkungan hidupnya, makin besar jumlah orangnya, maka semakin besar pula potensi pengaruhnya. Penelitian di dalam dan di luar negeri menunjukkan bahwa hal ini terjadi juga pada pola hidup masyarakat. Dengan pertumbuhan jumlah penduduknya mereka melakukan eksploitasi lebih pada sumber daya alamnya sehingga terjadi kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada umumnya tidak besar dan luas, karena jumlah

penduduknya yang kecil dan teknologi yang digunakan pun masih sederhana. Tetapi sejarah mencatat juga bahwa keruntuhan suatu negara disebabkan pula oleh kerusakan lingkungan hidup, misalnya Mesopotamia. Di daerah permukiman kumuh di Tanjungpinang, terdapat timbunan limbah sampah domestik, yang tingkat pencemarannya mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduknya, sehingga pada suatu saat nanti bukan tidak mungkin akan menjadi sumber penyakit.

Bersamaan dengan pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah pendapatan masyarakat juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pendapatan dan pengaruh pola hidup konsumtif yang disebarkan melalui advertensi yang canggih telah mendorong masyarakat untuk mengikuti pola hidup seperti ini. Pola hidup yang konsumtif ini mempunyai dua dampak terhadap lingkungan hidup. *Pertama*, pola hidup tersebut membutuhkan dana yang semakin besar. Untuk mendapatkan dana itu eksploitasi sumber daya alam makin meningkat dan telah mencapai pada tingkat yang membahayakan, misalnya terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penimbunan limbah sampah rumah tangga maupun industri. *Kedua*, tingkat konsumsi yang semakin tinggi, mulai dari bahan makanan dan kemasannya sampai pada BBM. Sehingga limbah yang dihasilkan dari sisa bahan konsumsi tersebut akan semakin besar pula. Sementara itu, pendapatan kita untuk menangani masalah sampah masih terbatas, akibatnya di daerah perkotaan maupun pedesaan banyak sampah yang tertumpuk atau berserakan.

Lebih-lebih lagi di wilayah perkotaan, hanya sebagian saja sampah yang

terangkut oleh petugas sampah dari Dinas Kebersihan kota. Sampah yang tidak terangkut kemudian menumpuk atau berserakan, yang kemudian menjadi tempat berkembang wabah penyakit. Disamping itu, banyak pula penduduk yang berusaha untuk memusnahkan sampah tersebut dengan membakarnya. Cara ini, akan menghasilkan zat-zat pencemar lainnya yang akan jauh lebih berbahaya. Pembakaran sampah dengan instalasi incinerator perlu juga dilakukan dengan hati-hati, karena banyak incinerator di negara maju ternyata menghasilkan dioksin. Oleh karena itu, hendaklah digunakan sewaktu pembakaran sampah.

Sementara itu, sampah yang terangkut tidak dikelola dengan baik. Tempat pembuangan akhir sampah pada umumnya menjadi sumber masalah pencemaran, yang antara lain menyebabkan bau busuk, pencemaran perairan, dan sumber penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan, seperti lalat dan tikus. Padahal untuk menjadikan kota yang bersih, sehat dan teratur serta berkelanjutan sebagai sebuah proses kreatif mencari keseimbangan yang luas antara pembangunan dengan pengelolaan lingkungan, walaupun dua persoalan ini memiliki urutan yang sama dalam pelaksanaannya.

4.2.2 Upaya Masyarakat Dalam Memelihara Kebersihan di Kota Tanjungpinang

Kebersihan adalah sangat tergantung dengan sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam keikut sertaannya untuk menunjang usaha dalam meningkatkan kebersihan lingkungan kota. Oleh karena itu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan dengan modal kesadaran itu, masyarakat

ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan kebersihan dilingkungannya masing-masing yang dalam prakteknya tidak ada lagi masyarakat yang mau membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut diatas, maka untuk meningkatkan kebersihan lingkungan Kota Tanjungpinang perlu diadakan penambahan jam kerja bagi para petugas kebersihan agar masalah persampahan dapat ditanggulangi dengan baik. Guna mencapai sasaran/target untuk memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Kota Tanjungpinang, tidak hanya berfokus pada para petugas kebersihan saja, tetapi perlu adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama memeliharanya. Pemerintah dapat mengalihkan fungsinya menjadi regulator dalam proses pengelolaan sampah yang berpihak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kebijakan pengolahan sampah di perkotaan sebaiknya diarahkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan, mengurangi dan memanfaatkan sampah sebanyak mungkin sebelum dibawa ke TPA

Sampah mempunyai potensi yang berdampak negatif untuk mencemari lingkungan, masyarakat beranggapan bahwa sampah dapat menimbulkan perasaan tidak estetik, perasaan kotor dan mengganggu pandangan mata.

Sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang akan mencemari udara. Jika terkena air dan membusuk juga akan mencemari air disekelilingnya, baik dengan bau, warna penyakit dan mikro organisme patogen lainnya. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah hilir sungai.

Potensi negatif dari sampah menurut Sudarso dapat menjadikan :

1. Tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus.
2. Menjadi sumber pengotoran tanah, air permukaan, air tanah maupun udara.
3. Dapat menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.

Dampak sampah terhadap kesehatan cukup besar karena sampah yang mencemari lingkungan akan menimbulkan penyakit (Gumbira, 1986). Pola penyebaran penyakit terutama penyakit menular, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontak antara penyebab penyakit, media penyebaran dan individu yang rentan terhadap penyakit (inang).

Faktor biologis (bakteri, virus, kapang, khamir dan parasit) yang disebabkan oleh pencemaran sampah, ternyata dapat menimbulkan penyakit pada manusia, bahkan dapat menularkannya kemasyarakat. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan memegang peranan yang lebih khusus dalam kasus-kasus penyakit menular melalui alat pencernaan, seperti tipus, kolera dan disentri. Diharapkan upaya-upaya masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan yang berwawasan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, diawali dari penghasil sampah sampai dengan pembuangan akhir yang terpola sedemikian rupa dengan melakukan pemisahan jenis sampah rumah tangga dalam kantong-kantong yang terpisah sebelum dibuang pada TPS-TPS terdekat, sehingga diharapkan masyarakat melakukan secara mandiri pemilahan sampah dalam wadahnya

4.3 Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Petugas Kebersihan Kota Tanjungpinang Dalam Kegiatan Pengumpulan Sampah

Permasalahan sampah sangat identik dengan masalah kebersihan lingkungan di Kota Tanjungpinang, karena sebagian besar dari masyarakat khususnya para petugas kebersihan kota adalah orang yang terlibat langsung dalam masalah kebersihan tersebut. Dalam kegiatan pengumpulan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh para petugas kebersihan kota, sampai saat ini dirasakan masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dari hasil survey di lapangan dapat diketahui bahwa, para petugas kebersihan tersebut hanya mengambil tumpukan sampah yang ada dalam bak/tong sampah saja, sedangkan sampah-sampah yang masih berserakan atau beterbangan di jalan, dibiarkan saja sehingga masih terlihat sisa-sisa sampah yang bertebaran di jalan dan lingkungan sekitarnya.

Sedangkan para petugas penyapu jalan yang bekerja sebagai pengumpul atau penyapu jalan dalam hal ini hanya melakukan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan, sehingga apabila tugas mereka telah selesai dan waktu kerjanya telah habis mereka langsung pulang, tidak menyelesaikan pengumpulan sampah ditempat tertentu (seperti gang dan lorong sempit yang sulit dijangkau oleh gerobak atau truk pengangkut sampah). Hal ini disebabkan karena diantara para petugas penyapu jalan tersebut ada yang memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai petugas kebersihan.

Dari hasil pengamatan mengenai perilaku para petugas pengumpul sampah dalam melakukan pengumpulan sampah, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masih belum meningkatnya kegiatan pengumpulan sampah tersebut, diantaranya adalah:

1. Faktor masih kurangnya kesadaran dari masing-masing individu dari para petugas kebersihan terhadap tugas yang di embannya.
2. Faktor waktu kerja yang sangat terbatas, sehingga dalam kegiatan pengumpulan sampah masih terkesan terburu-buru.
3. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi Dinas Kebersihan dalam mengkoordinir pengumpulan sampah.
4. Faktor pemberian upah / gaji yang diterima oleh para petugas kebersihan tersebut masih jauh di bawah standar UMR, sedangkan pekerjaan yang dilakukan mengandung resiko yang sangat besar terhadap kesehatan.

Untuk mengetahui lebih jelas prosentase mengenai perilaku petugas pengumpul sampah tersebut berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

TABEL 4.7
PERILAKU PETUGAS KEBERSIHAN DALAM MELAKUKAN
KEGIATAN PENGUMPULAN SAMPAH BERDASARKAN FAKTOR
PENYEBAB BELUM MENINGKATNYA KEGIATAN PENGUMPULAN
SAMPAH

NO	FAKTOR PENYEBAB	PETUGAS KEBERSIHAN JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Kurangnya kesadaran	17	8,7%
2.	Waktu kerja terbatas	63	31,97%
3.	Kurang pengawasan	19	9,6%
4.	Pemberian upah/gaji	98	49,7%
	Jumlah	197	100%

Sumber: Analisis Hasil Quesioner Tahun 2004

Beberapa faktor tersebut, sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku para petugas kebersihan, karena permasalahan ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota. Apabila permasalahan tersebut masih belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah kota, maka tidak akan mungkin pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Terutama dalam hal yang bersifat krusial, yaitu masalah pemberian upah / gaji para petugas kebersihan guna meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Mengenai upah / gaji para petugas kebersihan tersebut, klasifikasinya dapat dilihat pada tabel 4.8, berikut:

TABEL 4.8
KLASIFIKASI JUMLAH PENDAPATAN UPAH/GAJI PETUGAS
KEBERSIHAN KOTA TANJUNGPINANG

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah Gaji / Upah Setiap Bulan	Jumlah Orang
1	Sopir Truk Sampah	500 – 700 ribu	6 orang
2	Pekerja Pengumpul dengan Truk Pengangkut	300 – 350 ribu	24 orang
3	Pekerja Penyapu Tepi Jalan	300 – 350 ribu	169 orang

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Tahun 2004.

Jika dilihat dari klasifikasi hasil pendapat para petugas kebersihan kota Tanjungpinang sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas, maka sudah dapat disimpulkan bahwa jumlah upah/gaji pekerja sampah yang tergolong cukup hanyalah para sopir truk sampah yang yang jumlah pendapatannya antara 500 – 600 ribu rupiah perbulan. Sedangkan bagi para pekerja biasa, yaitu sebagai pengumpul dan penyapu sampah ditepi jalan hanya berpenghasilan antara 300 – 350 setiap bulannya, sudah tentu tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan

keluarganya sehari-hari. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari saja tidak mencukupi. Oleh karena itu, banyak diantara para pekerja kebersihan tersebut yang bekerja sampingan setelah melakukan kerja pengumpulan sampah. Diantara pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh para pekerja sampah itu, adalah memungut bahan-bahan bekas seperti; aluminium kaleng, besi, tembaga bekas kabel, plastik, dan sebagainya, kemudian dijual kepada agen penampungan yang ada di kota Tanjungpinang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah ini, terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah yang dikoordinasi oleh Dinas Kebersihan, dengan cara membagi tugas antara petugas pengangkut sampah dengan petugas pengumpul (penyapu) sampah.
2. Melakukan kegiatan “Jum’at Bersih” yang dilakukan setiap hari jum’at.
3. Penataan lokasi permukiman masyarakat yang dikategorikan kumuh dan liar.

Beberapa kebijakan Pemerintah Kota tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata dengan baik di wilayah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap 11 orang pegawai instansi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dari 11 orang pegawai, sebanyak 9 orang (81,8%) berpendapat agar optimalisasi dari kegiatan

pengumpulan sampah harus di perioritaskan terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan penambahan personil petugas kebersihan. Sedangkan mengenai masalah pemberian upah/gaji dan tunjangan kesehatan terhadap petugas kebersihan walaupun menjadi prioritas utama dan telah diusulkan kepada Pemerintah Kota, namun kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya tetap menjadi periorirtas utama yang harus segera di optimalkan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel (4.8), sebagai berikut:

TABEL. 4.9
PENDAPAT PARA PEGAWAI INSTANSI DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN MENGENAI PENINGKATAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG

NO	JENIS PROGRAM KERJA PEGAWAI DINAS	PROSENTASE KEBERSIHAN	%
1	Kegiatan a. Meningkatkan jam kerja dalam kegiatan pengumpulan sampah menjadi 2X (pagi dan sore) b. Mensosialisasikan kembali sanksi kepada masyarakat c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja bagi petugas kebersihan	9	81,8 %
2	Peningkatan upah / gaji dan tunjangan kesehatan bagi petugas kebersihan	2	18,2 %
	Jumlah	11	100

Sumber: Analisis Tahun 2004.

Dari hasil penyebaran questioner yang dilakukan kepada para pegawai yang ada di Instansi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, yang sebagian besarnya lebih cenderung untuk lebih mengoptimalkan masalah pengelolaan sampah disamping masalah pemberian gaji / upah dan tunjangan kesehatan petugas kebersihan. Adanya pendapat seperti ini dikarenakan oleh adanya kesadaran tentang sangat pentingnya lingkungan hidup yang bersih. Bukan

berarti tidak memperhatikan kesejahteraan para petugas kebersihan, karena masalah kesejahteraan bagi para petugas kebersihan tersebut juga merupakan prioritas utama bagi optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perlunya optimalisasi dalam kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, maka telah disebarakan pula kuesioner kepada tokoh-tokoh masyarakat dan dianggap mewakili masyarakat yang ada di masing-masing Kecamatan / Kelurahan di Tanjungpinang. Adapaun tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan sampah yang selama ini telah dijalankan. Untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya atas pandangan Tokoh masyarakat Kota Tanjungpinang yang selama ini , sangat memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang , terutama pada petugas pengumpul sampah sebagai upaya menciptakan suasana yang diinginkan, untuk itu dapat di lihat pendapat dari para tokoh masyarakat tersebut, dapat dilihat dalam tabel 4.10 berikut:

TABEL. 4.10
PENDAPAT PARA TOKOH MASYARAKAT MENGENAI
PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
KOTA TANJUNGPINANG

NO	PROGRAM KERJA DINAS KEBERSIHAN	TOKOH MASYARAKAT	%
1	Peningkatan Pengumpulan Sampah	23	77
2	Peningkatan Upah / Gaji Petugas Kebersihan	7	23
	Jumlah	30	100

Sumber: Analisis Tahun 2004

Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 23 orang (77%) responden berpendapat agar kegiatan pengumpulan sampah lebih dioptimalkan dan menjadi prioritas yang lebih utama, hal ini mengingat bahwa masalah sampah menyangkut kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Menurut mereka walaupun masalah kenaikan/peningkatan upah kerja bagi para petugas kebersihan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka sangat diperlukan, namun hal itu masih dapat dimusyawarahkan dengan pihak Pemerintah Kota, dan waktunya dapat ditentukan. Namun mengenai masalah pengumpulan sampah yang masih belum optimal ini, haruslah lebih diutamakan agar sesegera mungkin dapat diatasi.

Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa masalah kesejahteraan petugas lebih diprioritaskan, sebanyak 7 orang (23%) responden. Mereka mengemukakan, masalah peningkatan kesejahteraan para petugas kebersihan adalah merupakan suatu masalah krusial yang harus segera mendapatkan perhatian yang lebih utama dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Karena tidak mungkin seseorang dapat bekerja secara optimal jika hasil dari pekerjaan yang dilakukannya itu tidak dapat memenuhi standar kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, sehingga mereka merasa perlu untuk mencari atau mendapatkan penghasilan tambahan dari sektor pekerjaan lainnya. Jadi mereka dalam bekerja mengumpulkan sampah hanya sebatas waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan waktu kerja yang sempit dan terbatas itu, maka tidak mungkin mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan

maksimal bahkan yang terlihat dilapangan malah terkesan terburu-buru dalam melakukan kegiatan pengumpulan sampah dilokasi-lokasi TPS yang ada.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai kenaikan pemberian upah/gaji guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja kebersihan tersebut, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Tanjungpinang telah mengajukan suatu proposal mengenai upaya kenaikan upah/gaji para pekerja kebersihan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun dari hasil rapat yang koordinasi yang diadakan oleh Pemerintah Kota dan Dinas Kebersihan Tanjungpinang, memutuskan bahwa mengenai kenaikan gaji/upah tersebut baru akan dilaksanakan pada awal tahun 2006 nanti.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang optimalisasi petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang, menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah masih belum terlaksana secara meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mempengaruhinya. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meningkatnya kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah di kota Tanjungpinang, diantaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pada bahaya limbah sampah, sehingga mereka menyerahkan masalah kebersihan lingkungan hanya kepada petugas kebersihan. Diikuti pengawasan yang perlu ditingkatkan oleh lembaga yang mengelola persampahan
2. Waktu kerja yang sempit dan terbatas, sehingga para pekerja kebersihan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan pekerjaan sampingan yang dominan.
3. Dalam mengelola sampah di kota Tanjungpinang kelembagaan masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah kota Tanjungpinang serta pembayaran upah yang masih perlu peningkatan

5.2 Rekomendasi

Studi yang telah dilakukan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi yang terkait dengan program peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga, dengan mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang meningkatnya pengelolaan sampah tersebut.

1. Memberikan pemahaman yang mendasar tentang bahaya tumpukan sampah yang tak terangkut dengan mengefektifkan pengawasan oleh lembaga yang mengelola persampahan.
2. Menjadwalkan kembali waktu-waktu petugas pengumpul sampah dalam melakukan pengumpulan sampah dan diiringi dengan kegiatan rutinitas Jum'at bersih.
3. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk mendapatkan peningkatan pengelolaan sampah perlu didukung sarana dan pra sarana yang memadai serta peningkatan pendapatan petugas pengumpul sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, 1999, *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Berry John, Poortinga, Segall Marshall, Dasen Piere. 1999. *Psikologi Lintas Budaya Riset dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Budihardjo, Eko. 1999. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____ 1999, *Kota yang Berkelanjuta*. Bandung :penerbit Alumni
- Conyers Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gama Press.
- Daljoeni N. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung: Alumni.
- _____ , 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni.
- Danin Sudarwan. 2000. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gilbert Alan dan Gugler Josep. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gumbira Sa'id. 1986. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- H.A.S. Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koestoer H Raldi. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press.
- KusnoPutranto, 2000. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mansyur Chalil M. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marbun. 1994. *Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, 1999, *Analisa Data Kualitatif*, penerbit UI Press
- Murdiriyanto. 1996. *Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos*. Jakarta: Sanitek Konsultindo.
- Nasir M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmandi Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran.
- Outer Bridge, Thomas B. 1991. *Limbah Padat di Indonesia: Masalah atau Sumber Daya*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Rukmana Nana. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Sarwono Wirawan. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- _____, 2000. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sears David, Friedman Jonathan & Peplav Anne. 1985. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pribadi dan Masyarakat*. Bandung: Alurni.
- Soerjani, Ahmad Rofiq dan Rozy Munir. 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Somarwoto, Otto, 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sudarso. 1995. *Pembuangan Sampah*. Jakarta: Depkes.
- Sugiyono. 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 1995. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiarto, 1994, *Teknik Sampling*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tillena, 1987, *Kromoblanda*. London: Routledge

Walgito Bimo, 2000, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar* Yogyakarta: Andi Offset